

Katalog: 3302001.35

A large, stylized graphic of a house outline in shades of blue. Inside the house, there is a bar chart with three bars of increasing height. The year '2017' is written in large red font across the middle of the house.

**STATISTIK
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

A stylized graphic of a house with a gabled roof, rendered in a dark gray outline. Inside the house, there is a simple bar chart with three vertical bars of varying heights. The background features a light gray circular gradient and a thin, curved line.

**STATISTIK
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

2017

Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2017

ISBN : 978-602-6756-75-6
Katalog : 3302001.35
No Publikasi : 35520.1804

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : xii + 47 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Desain Sampul :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh :
© BPS Provinsi Jawa Timur

Dicetak oleh :
PT Sinar Multi Indoprinting

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2017

Pengarah :

Teguh Pramono, MA.

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Zulkipli, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis :

Hermanto, S.Si., M.S.E.

Editor :

Hermanto, S.Si., M.S.E.

Penulis dan Pengolah Data :

Suwito, S.E., M.M.
Daizy Pangeswari, S.E., M.M.
Natria Nur Wulan, S.Si.

Desain/Layout :

Suwito, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Dalam rangkaian proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pemantauan kemajuan yang berkesinambungan dan melihat hasil evaluasi pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan harus selalu didasari dari data. Salah satunya adalah data sosial ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung rangkaian proses tersebut. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bertujuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk Jawa Timur dengan pendekatan rumah tangga, dapat digunakan sebagai salah satu rujukan data pendukung dalam perencanaan pembangunan. Dalam buku Statistik Perumahan dan Pemukiman Jawa Timur 2017 ini merupakan laporan ringkas mengenai kondisi perumahan dan pemukiman di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2017.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi para pengguna data, serta pengambil kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman, dalam rangka merencanakan, memantau dan menilai hasil-hasil pembangunan di bidang terkait apakah telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam terwujudnya laporan eksekutif ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya.

Demikian, semoga laporan eksekutif ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Juli 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur



Teguh Pramono, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN TABEL	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika penulisan	3
II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Susenas	5
2.2. Konsep dan Definisi	6
III ULASAN RINGKAS	12
3.1. Umum	12
3.2. Status Penguasaan Tempat Tinggal	12
3.3. Kondisi Fisik Bangunan Rumah Tinggal	14
3.3.1. Luas Lantai	15
3.3.2. Kualitas Atap Rumah/Bangunan Terluas	16
3.3.3. Kualitas Dinding Rumah/Bangunan Terluas	17
3.3.4. Kualitas Fasilitas BAB yang Digunakan	18
3.3.5. Jenis Kloset yang Digunakan	19
3.3.6. Kualitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	20
3.3.7. Kualitas Sanitasi yang Digunakan Rumah Tangga	21
3.3.8. Kualitas Sumber Air Rumah Tangga	22
3.3.9. Kualitas Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga	23
3.3.10. Jarak Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat	24
3.3.11. Cara Memperoleh Air Minum	25
3.3.12. Penggunaan Bahan Bakar Utama untuk Memasak	26
3.3.13. Sumber Penerangan Utama	27
Lampiran Tabel	29

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal dan Wilayah di Jawa Timur, 2017.....	13
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan yang Ditempati di Jawa Timur, 2016-2017	15
Gambar 3	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Atap di Jawa Timur, 2017	16
Gambar 4	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Rumah Tinggal di Jawa Timur, 2016-2017	17
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas BAB di Jawa Timur, 2016-2017	18
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Timur, 2016-2017	20
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga menurut Kelayakan Sarana Sanitasi di Jawa Timur, 2016 – 2017	22
Gambar 8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang Digunakan dan Wilayah di Jawa Timur, 2017	23
Gambar 9	Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Jawa Timur, 2017	24
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum di Jawa Timur, 2016-2017	26
Gambar 11	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan Memasak dan Wilayah di Jawa Timur, 2017.....	27
Gambar 12	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Wilayah di Jawa Timur, 2017.....	28

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

	Halaman
Tabel 1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	31
Tabel 2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan Tempat Tinggal per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	32
Tabel 3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017.....	33
Tabel 4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	34
Tabel 5 Persentase rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	35
Tabel 6 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	36
Tabel 7 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	37
Tabel 8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	38
Tabel 9 Persentase Rumah Tangga Dibedakan menurut Sanitasi Layak/Tidak Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	39
Tabel 10 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016- 2017	40
Tabel 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017	41
Tabel 12 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017	42

Tabel 13 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak/Tidak Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	43
Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	44
Tabel 15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017.....	45
Tabel 16 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017	46
Tabel 17 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017	47

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 h ayat (1), menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa. Ini berarti negara bertanggung jawab melindungi segenap warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan perumahan dan permukiman bagi warga negara Indonesia agar dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat dan aman.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat biasanya diukur bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar, sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi pasangan keluarga baru sebagai rumah tinggal. Sebagai tempat tinggal idealnya memiliki fasilitas kamar tidur, mandi, dapur, jamban (WC) tersendiri, disamping fasilitas penerangan, sumber air bersih untuk minum, memasak dan mandi/cuci/dll.

Disamping kebutuhan rumah yang sehat, lingkungan yang bersih dan sehat jauh dari polusi udara merupakan harapan sebagian besar penduduk. Namun demikian kondisi ideal ini sulit didapatkan karena kendala ketersediaan lahan permukiman yang terbatas dan selalu berkurang, tidak berimbang dengan penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Hal ini utamanya dirasakan di wilayah perkotaan yang memiliki lahan terbatas dengan jumlah penduduk yang padat dan selalu bertambah setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak terhadap pembangunan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk

mengatur dan menata ketersediaan permukiman bagi penduduk. Sehingga permasalahan *housing backlog* atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diminimalkan.

Pemukiman yang padat penduduk berpotensi menimbulkan efek negatif yang cukup besar terhadap permasalahan sosial ekonomi bagi warga yang tinggal didalamnya. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga memicu tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat yang tidak rapih dan terkesan kurang sehat/kumuh. Kondisi lingkungan dan fasilitas rumah tinggal penduduk dapat menjadi cermin kondisi sosial ekonomi yang bermukim didalamnya. Penduduk yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas, biasanya cenderung tinggal di lingkungan pemukiman yang relatif layak huni. Sementara untuk penduduk dengan strata ekonomi bawah umumnya tinggal di lingkungan yang terbatas.

Di dalam pasal 4 Undang-undang nomor 4 tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk memenuhi informasi mengenai kondisi perumahan serta permukiman saat ini agar dapat diperoleh dampak dari pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang sudah dilaksanakan. Serta sebagai rujukan dalam penyusunan rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman ke depan, maka diperlukan data dan informasi mengenai kondisi perumahan dan permukiman di Jawa Timur setiap tahunnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini BPS Provinsi Jawa Timur, secara rutin setiap tahun berupaya menyajikan informasi/data tentang perumahan yang merupakan hasil dari kegiatan Susenas. Namun perlu

dipahami bahwa sampel data Susenas didesain hingga sampai level kabupaten/kota. Sehingga hasilnya merupakan fenomena/kondisi secara makro yang ada di wilayah kabupaten/kota dan tidak dapat menggambarkan kondisi wilayah pada tingkat di bawahnya seperti Kecamatan, Desa/Kelurahan apalagi sampai tingkat RW/RT. Karena untuk kepentingan kebutuhan data sampai pada wilayah terkecil diperlukan sampel yang lebih besar atau dilaksanakan secara sensus untuk memperoleh kondisi *by name by address*.

Publikasi Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur tahun 2017 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data perumahan di Provinsi Jawa Timur terutama untuk tahun 2017. Namun dalam ulasan juga disajikan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan.

Adapun data yang disajikan diantaranya kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan serta data terkait perumahan dan pemukiman lainnya, yang bermanfaat untuk bahan evaluasi dan monitoring tingkat keberhasilan program di bidang perumahan bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan di bidang perumahan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajiannya disusun dalam tiga bab diantaranya berisi Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II Metodologi, berisi sumber data, serta konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Bab III Ulasan Ringkas, berisi ulasan singkat mengenai kondisi perumahan. Pada bagian terakhir terdapat lampiran tabel-tabel yang berisi data/informasi terkait dalam pembahasan ini. Data yang dimunculkan dalam tabel lampiran sebagian besar menurut wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur terutama tahun 2017 dan tahun sebelumnya.

Adapun informasi tabel yang disajikan diantaranya tentang kondisi rumah tinggal menurut penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan,

luas lantai per kapita, serta atap dinding dan lantai terluas. Disamping itu juga dimuat data mengenai fasilitas yang dimiliki rumah tangga diantaranya kualitas air minum, sumber air minum, sumber air untuk MCK, jarak penampungan kotoran (tinja) terhadap sumber air minum rumahtangga, fasilitas tempat buang air besar, bahan bakar dan sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB 2 METODOLOGI

2.1. Metodologi Susenas

Sumber data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Jawa Timur terutama tahun 2017. Desain sampel secara nasional, dengan representasi hasil merupakan gambaran umum fenomena/kondisi perumahan di Jawa Timur tahun 2017 hingga tingkat kabupaten/kota.

Rumah tangga yang dipilih dalam sampel Susenas 2017 adalah rumah tangga biasa, sedang rumah tangga dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya serta rumah tangga khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di dalam blok sensus biasa tidak dipilih sebagai sampel. Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden.

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk setiap individu dalam rumah tangga, pencacah berupaya agar semua keterangan berasal dari masing-masing individu tersebut. Namun jika tidak semua individu ART ada saat wawancara, maka informasi dari salah satu ART sebagai pemberi informasi, yang dapat menjelaskan atau mengetahui informasi tentang data dari seluruh ART lainnya. Bilamana diperlukan jika informasi tentang ART tersebut tidak diketahui oleh ART pemberi informasi, maka petugas pengumpul data Susenas berupaya mendapatkan informasi secara langsung. Keterangan yang bersifat umum dikumpulkan melalui kepala rumah tangga (KRT), pasangan KRT atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang terpilih sampel.

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep definisi yang digunakan, antara lain:

-
-
- ❖ **Rumah tangga biasa**, adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur.

Rumah tangga biasa biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasanya antara lain:

- a. Seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam satu blok sensus yang sama.
- c. Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain:

- a. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Anggota TNI dan POLRI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
- b. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan.
- c. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.
- d. ***Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam sampel Susenas.***

-
-
- ❖ **Kepala Rumah tangga khusus (KRT)** adalah seorang dari satu atau sekelompok anggota rumah tangga, yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
 - ❖ **Anggota rumah tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih dan ART yang bepergian kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut selama enam bulan atau lebih dianggap sebagai ART.

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.
 - ❖ **Rumah**, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).
 - ❖ **Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal**, meliputi milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya.
 - ❖ **Rumah Milik Sendiri**, adalah rumah yang pada saat pencacahan dimiliki oleh salah satu anggota rumah tangga (termasuk yang masih dalam masa kredit).
 - ❖ **Rumah Kontrak**, adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dalam jangka tertentu, menurut perjanjian antara pemilik dan pemakai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - ❖ **Rumah Sewa**, adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

-
-
- ❖ **Rumah Bebas Sewa**, adalah rumah yang diperoleh dari pihak lain dan ditempati (didiami) oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
 - ❖ **Rumah Dinas**, adalah rumah yang dimiliki oleh suatu instansi tempat bekerja dari salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
 - ❖ **Rumah milik orang tua/famili**, adalah rumah bukan milik sendiri, melainkan milik orang tua/famili dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
 - ❖ **Lantai**, adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah, seperti: keramik, marmer, papan, dan semen.
 - ❖ **Luas lantai**, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Sedangkan bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai.
 - ❖ **Luas lantai per kapita** adalah rasio luas rumah/bangunan tempat tinggal dibagi jumlah penghuni per meter persegi.
 - ❖ **Atap**, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung terutama dari terik matahari serta hujan.
 - ❖ **Beton**, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
 - ❖ **Genteng**, adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/*polycarbonate*.
 - ❖ **Asbes**, adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
 - ❖ **Lainnya**, meliputi kayu/sirap, seng, bambu, jerami, ijuk.
 - ❖ **Dinding**, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan lain.

-
-
- ❖ **Tembok**, adalah dinding yang terbuat dari susunan batu merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen.
 - ❖ **Plesteran anyaman bambu/kawat**, adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 meter x 1 meter yang dibingkai dengan balok, diplester dengan campuran semen dan pasir.
 - ❖ **Kayu**, adalah dinding yang terbuat dari bagian pohon yang tua.
 - ❖ **Batang kayu**, adalah dinding yang terbuat dari batan pohon yang masih utuh/bulat.
 - ❖ **Anyaman bambu**, adalah bambu yang diiris tipis-tipis, dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
 - ❖ **Lainnya**, meliputi seng, kardus, dan lain-lain.
 - ❖ **Jamban/kloset**, adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kaskus.
 - ❖ **Kloset leher angsa**, adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
 - ❖ **Plengsengan**, adalah jamban/kaskus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
 - ❖ **IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)/SPAL**, yaitu sebuah struktur yang dirancang secara terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain.
 - ❖ **Got/selokan** adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan tinja/limbah/air hujan ke suatu tempat untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan.
 - ❖ **Lubang tanah** adalah liang atau lekukan di dalam tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
 - ❖ **Sumber air minum**, antara lain: air dalam kemasan, air leding, air pompa, air sumur (perigi), dan mata air.

-
-
- ❖ **Air dalam kemasan**, adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan (gallon, botol atau gelas).
 - ❖ **Air leding PAM/PDAM**, adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air.
 - ❖ **Sumur bor/pompa** yaitu air tanah yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
 - ❖ **Air sumur terlindung**, adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali serta dilindungi oleh tembok dan lantai semen.
 - ❖ **Mata air terlindung**, adalah sumber air dari permukaan tanah yang timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
 - ❖ **Air sumur/mata air tak terlindung**, adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali, atau air yang muncul dari permukaan tanah, tanpa ada perlindungan terhadap limbah.
 - ❖ **Listrik PLN dengan meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).
 - ❖ **Listrik PLN tanpa meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang bersumber langsung dari tiang listrik, tidak melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.
 - ❖ **Listrik non PLN** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu/aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
 - ❖ **Sumber penerangan bukan listrik** yaitu sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri dan lain-lain.
 - ❖ **Listrik pra bayar** yaitu cara pembayaran tagihan listrik PLN yang memungkinkan konsumen melakukan kontrol terhadap pemakaian listrik mereka sendiri. Dalam cara pembayaran ini konsumen tidak akan

dikenakan sanksi pemutusan, tidak ada uang jaminan pelanggan dan tidak ada biaya beban bulanan. Dalam listrik pra bayar konsumen diharuskan untuk membayar dimuka biaya listrik yang akan digunakan dengan cara membeli token KWH.

- ❖ **Listrik pasca bayar** yaitu cara pembayaran tagihan listrik PLN yang mengharuskan konsumen untuk membayar biaya tagihan setiap bulan.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB 3 ULASAN RINGKAS

3.1. Umum

Permasalahan hunian rumah/bangunan tempat tinggal merupakan kondisi yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Kondisi luas wilayah permukiman di daerah kabupaten/kota yang terbatas, tidak bisa mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk yang berakibat pada kepadatan penduduk antar wilayah kabupaten/kota tidak merata.

Berkaitan dengan hak bertempat tinggal sesuai amanat konstitusi pada bahasan sebelumnya, gambaran data/informasi berkaitan dengan rumah/bangunan tempat tinggal penduduk akan diulas pada bagian ini. Dimana akan diulas kondisi/situasi rumah tangga, terutama hasil kegiatan Susenas 2017, diantaranya adalah status kepemilikan rumah/bangunan, luas lantai per kapita dan rata-rata luas lantai perkapita, jenis atap, dinding terluas, fasilitas tempat BAB, jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja dan lain-lain.

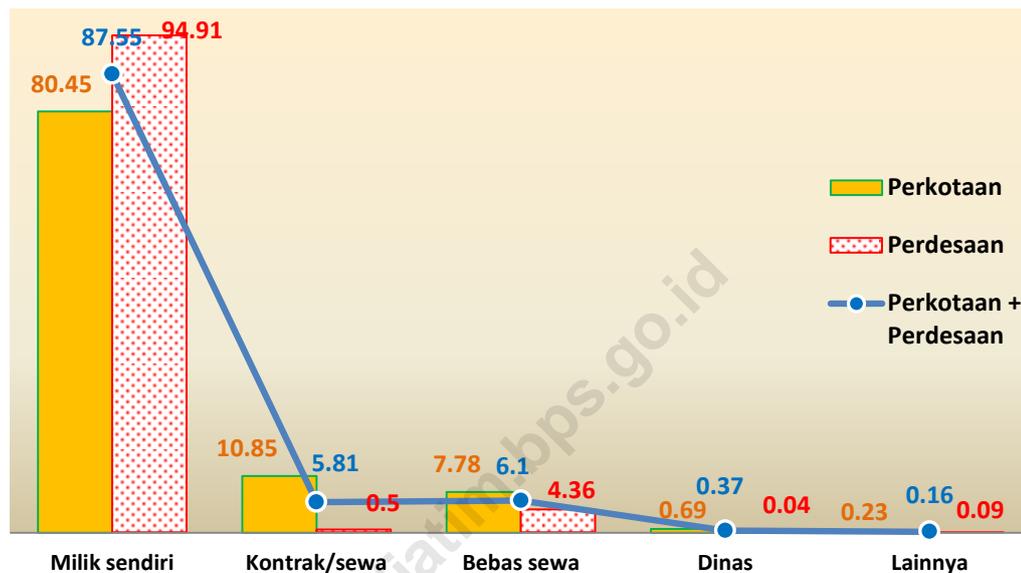
3.2. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Perbedaan kondisi wilayah dimana rumah tangga berada dapat menyebabkan perbedaan pemenuhan rumah tangga akan kebutuhan rumah/bangunan. Seperti pada kepemilikan rumah/bangunan, rumah tangga dapat dibedakan berdasarkan rumah/bangunan yang dimiliki menjadi milik sendiri, kontrak/sewa, dan sebagainya. Tentu harapan dari setiap rumah tangga adalah terpenuhinya rumah atau bangunan berstatus milik sendiri untuk setiap kepala rumah tangga.

Secara umum status penguasaan rumah/bangunan tempat tinggal di Jawa Timur sebagian besar milik sendiri (87,55 persen). Jika ini dijadikan indikator *housing backlog*, maka masih ada lebih dari sepuluh persen rumah tangga di Jawa Timur 2017 yang tidak tinggal di rumah milik sendiri.

Kepemilikan rumah milik sendiri menjadi masalah dominan, terutama bagi rumah tangga yang berada di perkotaan, yang angkanya terpaut hampir lima belas persen lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan.

Gambar 1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan
Tempat Tinggal dan Wilayah di Jawa Timur, 2017



Masalah kepemilikan rumah dengan status milik sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi mereka yang berada di perkotaan, dimana hampir dua puluh persen rumah tangganya belum memiliki rumah milik sendiri. Sedangkan di wilayah perdesaan rumah/bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri menjadi masalah bagi lima persen rumah tangga di perdesaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya rumah tangga di perkotaan yang belum memiliki rumah milik sendiri, terutama karena keterbatasan lahan di perkotaan dengan densitas penduduk yang lebih tinggi, sehingga permintaan akan kebutuhan rumah tinggal akan meningkat. Kondisi ini menyebabkan tingginya harga rumah tinggal serta lahan untuk permukiman dibandingkan dengan di wilayah perdesaan.

Bila dilihat menurut daerah Kabupaten/Kota, masalah *housing backlog* terbesar terjadi berturut-turut (dari yang terendah persentase rumah

tangga yang memiliki bangunan/rumah tinggal milik sendiri) yaitu pada tiga wilayah Kota, yaitu Surabaya (56,81 persen), Madiun (58,49 persen) dan Malang (63,89 persen). Cukup dimaklumi jika kondisi ini terjadi di wilayah-wilayah tersebut, terutama karena pesatnya perekonomian serta pusat kota pendidikan di Jawa Timur, yang meningkatkan permintaan lahan sebagai pendukung aktifitas ekonomi dan penunjang pendidikan. Sedangkan wilayah dengan pemenuhan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri terbesar di tiga wilayah Kabupaten, yaitu Pacitan (96,21 persen), Bojonegoro dan Tuban (masing-masing 96,08 persen).

Pesatnya aktifitas perekonomian di Kota Surabaya juga terlihat dari besarnya rumah tangga yang bertempat tinggal pada rumah atau bangunan kontrak atau sewa. Dimana tiga dari sepuluh rumah tangga di Surabaya tinggal di rumah/bangunan tempat tinggal berupa sewa/kontrak. Kota Malang sebagai pusat pendidikan di Jawa Timur berada di urutan kedua, dimana 2-3 dari sepuluh rumah tangga di Kota Malang tinggal di dikontrak atau rumah sewa.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016, persentase rumah tangga yang menempati rumah/bangunan tempat tinggal dengan status kepemilikan milik sendiri memperlihatkan penurunan sebesar 3,21 persen, dari 90,76 persen tahun 2016, menjadi 87,55 persen pada tahun 2017. Kondisi ini diduga karena semakin bertambahnya rumah tangga yang mekar. Pada beberapa wilayah sering dijumpai satu bangunan/rumah tinggal dihuni dari beberapa generasi atau lebih dari satu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan di beberapa wilayah, rumah/bangunan tempat tinggal berupa kontrak/sewa meningkat.

3.3. Kondisi Fisik Bangunan Rumah Tinggal

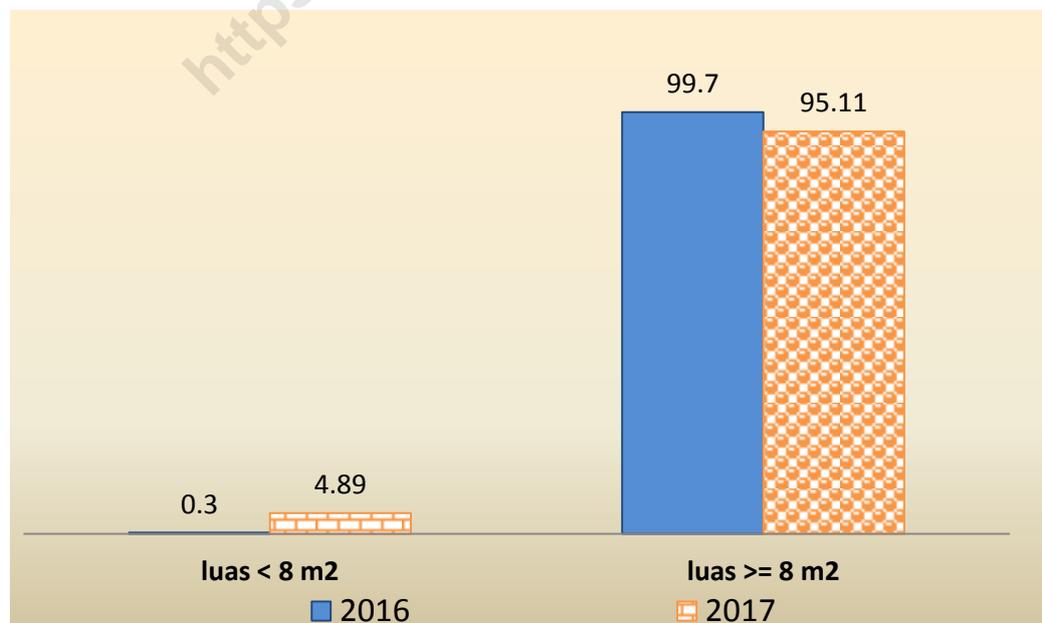
Kondisi fisik rumah/bangunan tempat tinggal merupakan hal yang berkorelasi dengan kualitas hidup para penghuninya. Karena kualitas fisik bangunan tempat tinggal dapat langsung mempengaruhi derajat kesehatan

mereka yang berada di dalamnya. Semakin baik strata ekonomi rumah tangga memiliki kecenderungan, semakin baik pula kondisi fisik rumah tinggal rumah tangga. Namun demikian, faktor pengetahuan dan lingkungan juga turut memberi pengaruh akan kondisi ini. Pada bahasan selanjutnya, akan diulas mengenai kondisi fisik bangunan rumah tinggal dari rumah tangga di Jawa Timur, seperti: luas lantai, atap terluas, dinding serta kondisi fisik yang lain.

3.3.1. Luas Lantai

Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal umumnya berkaitan dengan status ekonomi rumah tangga serta dipengaruhi juga dimana permukiman tersebut berada. Hasil Susenas, dapat digunakan untuk melihat luasan lantai rumah/bangunan tempat tinggal. Dimana berdasarkan kriteria kelayakan, luas lantai per kapita layak huni, jika memiliki luas minimal 8 meter persegi per orang.

Gambar 2
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan yang Ditempati di Jawa Timur, 2016-2017



Pada tahun 2017 terdapat 95,11 persen rumah tangga di Jawa Timur memiliki rumah/bangunan dengan luas lantai minimal 8 meter persegi per kapita. Kondisi ini menurun dibanding tahun 2016, yang diduga salah

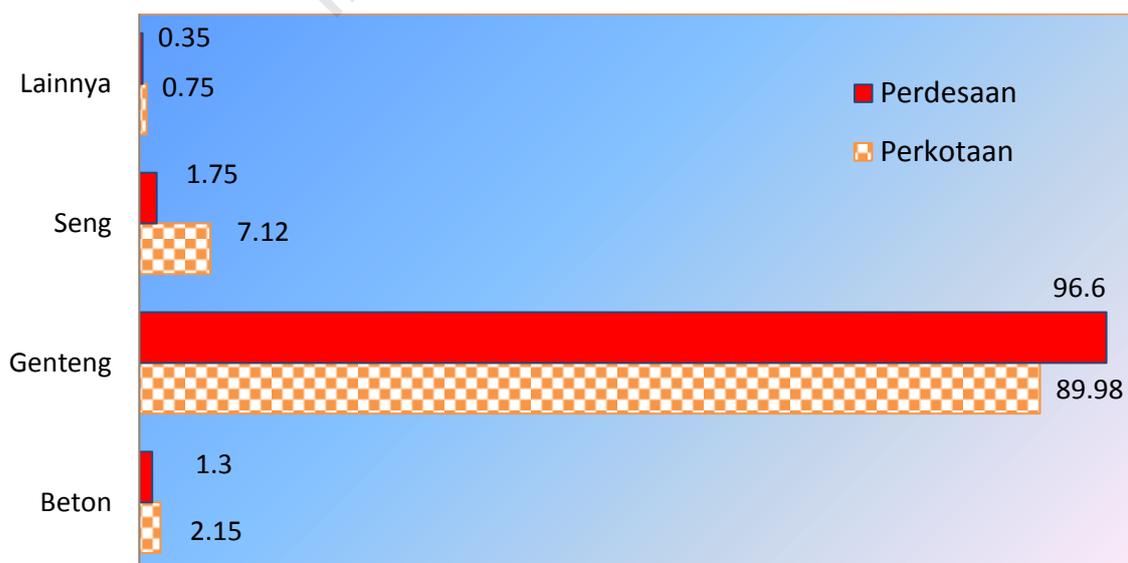
satunya karena semakin bertambahnya muatan anggota atau rumah tangga dalam satu rumah/bangunan.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota maka rumah tangga yang menempati rumah/bangunan dengan luas lantai ≥ 8 meter persegi per kapita memperlihatkan persentase terendah berada di Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan permasalahan keterbatasan lahan yang ada di Kota Surabaya, sehingga harga per satuan meter persegi, relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur.

3.3.2. Kualitas Atap Rumah/Bangunan Terlulus

Hasil Susenas 2017 memperlihatkan bahwa di Jawa Timur atap jenis genteng masih menjadi bahan atap terlulus bagi sebagian besar rumah tangga, yaitu sebesar 93,23 persen kondisi ini masih berada pada kisaran yang sama dengan tahun 2016. Jenis atap terbesar selanjutnya adalah jenis atap asbes, yaitu sebanyak 4,48 rumah tangga. Seperti halnya atap genteng, penggunaan atap terlulus jenis asbes ini juga masih berada di kisaran yang sama dengan kondisi tahun 2016.

Gambar 3
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Atap di Jawa Timur, 2017

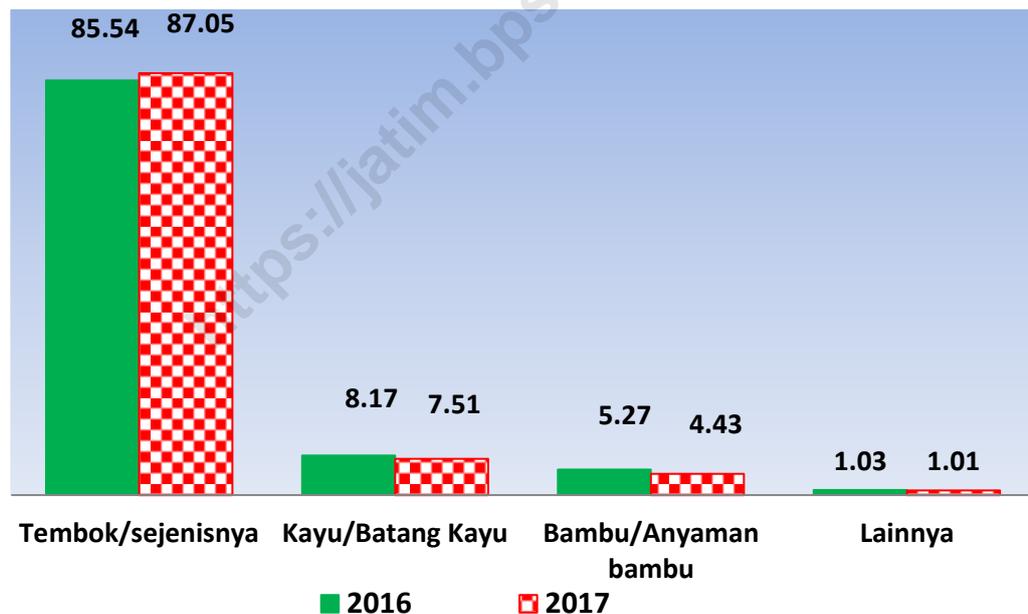


Jika dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, maka lebih dari 95 persen rumah tangga di perkotaan menggunakan atap jenis genteng. Sedangkan penggunaan atap jenis genteng di wilayah perdesaan kurang dari 90 persen.

3.3.3. Kualitas Dinding Rumah/Bangunan Terluas

Berdasarkan data Susenas 2017, dinding bangunan rumah tinggal di Jawa Timur pada umumnya terbuat dari tembok. Terjadi peningkatan lebih dari satu persen penggunaan dinding tembok pada rumah tangga di Jawa Timur, bila dibandingkan tahun 2016. Sementara jenis dinding selain tembok terjadi penurunan selama 2016-2017.

Gambar 4
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Rumah Tinggal di Jawa Timur, 2016-2017



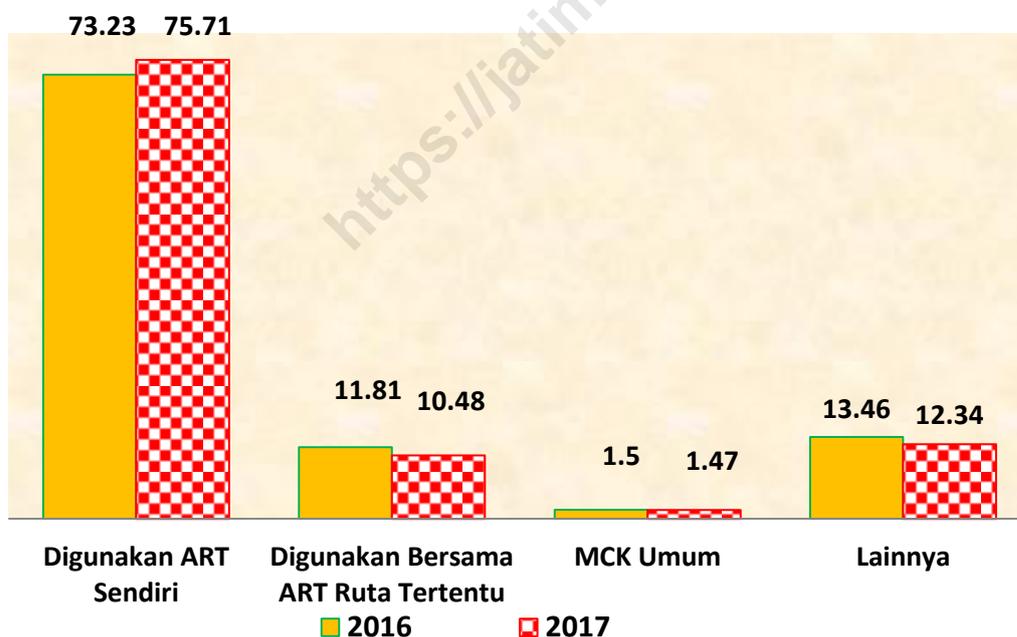
Penggunaan jenis dinding tembok terendah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Dimana masyarakat di kabupaten ini banyak yang menggunakan jenis dinding kayu atau batang kayu. Meskipun demikian, terjadi pergeseran dominasi, bila semula dinding berjenis kayu atau batang kayu menjadi jenis dinding yang paling dominan, maka di tahun 2017 sudah bergeser dinding tembok yang paling dominan, meskipun terpaut hanya dua persen. Sementara itu dinding berjenis bambu atau anyaman bambu masih cukup

banyak digunakan oleh rumah tangga, terutama di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember dan Pamekasan. Pada wilayah tersebut, dari sepuluh rumah tinggal akan kita temukan satu rumah tinggal dengan jenis dinding berupa bambu atau anyaman bambu. Namun demikian penggunaan jenis dinding ini mengalami penurunan, terutama di keempat kabupaten tersebut.

3.3.4. Kualitas Fasilitas BAB yang Digunakan

Fasilitas tempat BAB merupakan salah satu fasilitas penting yang harus dimiliki rumah/bangunan tempat tinggal, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah/bangunan tempat tinggal rumah tangga. Biasanya dibuat menjadi satu didalam kamar mandi. Fasilitas ini merupakan salah satu yang memiliki kontribusi pada upaya peningkatan kesehatan di masyarakat, terutama pada akses yang baik.

Gambar 5
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas BAB
di Jawa Timur, 2016-2017



Berdasarkan hasil Susenas menunjukkan bahwa rumah/bangunan tempat tinggal yang rumah tangganya memiliki sendiri fasilitas BAB meningkat lebih dari dua persen, dari 73,23 persen di tahun 2016 menjadi 75,71 persen pada tahun 2017. Namun demikian hal yang masih perlu

menjadi catatan adalah kondisi dimana satu dari empat rumah tangga masih belum memiliki akses tersendiri ke fasilitas BAB di Jawa Timur. Mengingat besarnya manfaat dari kepemilikan sendiri fasilitas BAB oleh rumah tangga ini dapat menurunkan angka kesakitan terutama untuk penyakit yang ditularkan lewat BAB.

Bila dilihat menurut sebaran wilayah kabupaten/kota, permasalahan akses fasilitas BAB ini menjadi permasalahan di empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Probolinggo dan Jember. Karena empat dari sepuluh rumah tangga di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo berstatus anggota rumah tangga tidak mengakses MCK atau tidak ada fasilitas BAB. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo dan Jember empat dari sepuluh rumah tangganya tidak mengakses MCK atau tidak ada fasilitas BAB. Hal ini tentu akan memberi pengaruh pada aspek kualitas masyarakat di wilayah-wilayah ini.

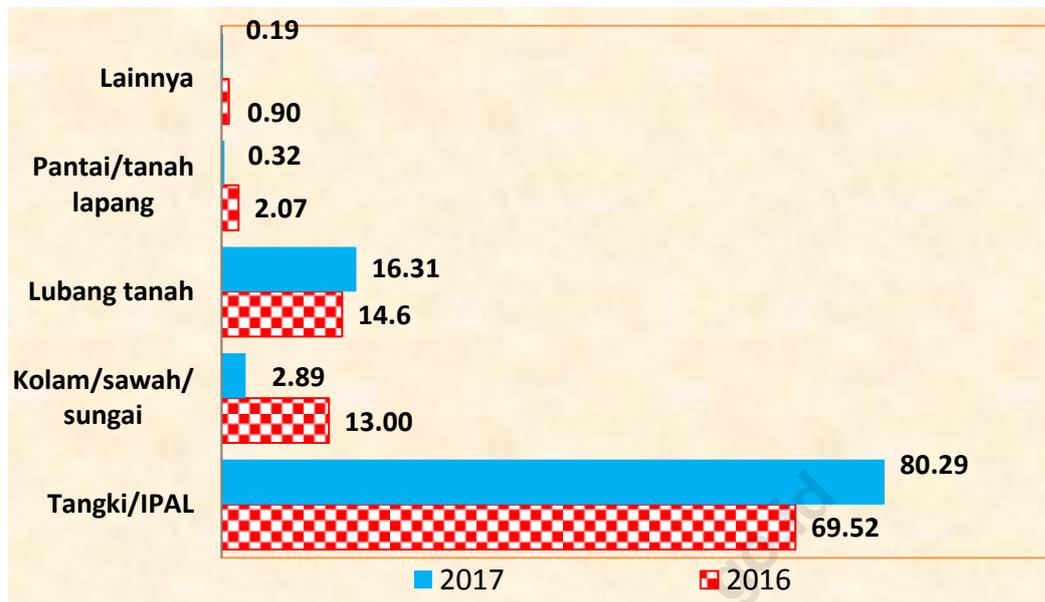
3.3.5. Jenis Kloset yang Digunakan

Penggunaan kloset rumah tangga yang baik juga turut menjadi indikator yang berperan dalam peluang menekan angka kesakitan, terutama dengan pemanfaatan jenis kloset yang dapat mengurangi penularan jenis penyakit yang ditularkan melalui medium feses.

Berdasarkan hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa Sembilan dari 10 rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB menggunakan kloset jenis leher angsa (90,37 persen). Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB dengan kloset leher angsa sebesar 88,10 persen. Pemanfaatan kloset leher angsa ini dapat menekan angka kesakitan yang ditularkan melalui medium feses.

Sementara itu masih ada 7,89 persen rumah tangga di Jawa Timur tahun 2017 yang memiliki fasilitas BAB dengan jenis kloset cemplung/cubluk. Kloset jenis ini sangat rentan terjadinya kontak antara pengguna yang sehat dengan pengguna yang sakit yang ditularkan melalui medium feses.

Gambar 6
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Timur, 2016-2017



Berdasarkan sebaran wilayah, penggunaan kloset jenis leher angsa oleh hampir seluruh rumah tangga yaitu di Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Kota Blitar, Batu, dan Kota Kediri yang persentasenya di atas 99 persen. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bangkalan, Pacitan, Sumenep, dan Sampang merupakan wilayah dengan rumah tangga yang masih menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk yang tinggi yaitu di atas 20 persen. Bahkan untuk Kabupaten Bangkalan penggunaan kloset cemplung atau cubluk oleh lebih dari separuh rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB di rumah/bangunan tempat tinggalnya.

3.3.6. Kualitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Salah satu faktor penting didalam upaya pencapaian kesehatan masyarakat diantaranya adalah kebersihan lingkungan di area hunian permukiman. Keterbatasan lahan permukiman dengan penataan yang tidak teratur berpotensi menjadikan permukiman kumuh, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan di area tersebut. Salah satu penunjang kebersihan lingkungan salah satunya fasilitas tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga.

Berdasarkan data Susenas 2017, persentase rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Jawa Timur sebagian besar menggunakan tangki/IPAL dengan persentase mencapai 80,29 persen meningkat dibandingkan tahun 2016 yang persentasenya sebesar 69,52 persen. Peningkatan persentase lebih dari sepuluh persen ini cukup menggembirakan, mengingat penggunaan tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja ini akan mengurangi kontaminasi air tanah dengan air limbah. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, karena masih ada hampir dua puluh persen rumah tangga di Jawa Timur yang tempat pembuangan akhir tinja berada di kolam/sawah/sungai, lubang tanah, pantai/tanah lapang dan lainnya. Masyarakat yang berada pada wilayah dengan kondisi seperti ini akan rentan terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh media feses dan berpeluang menjadi wabah penyakit.

Bila dilihat menurut wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Bangkalan serta Pacitan merupakan wilayah yang mesti menjadi prioritas dalam meningkatkan penggunaan Tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Karena pada wilayah-wilayah tersebut, lebih separuh rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas BAB menjadikan lubang tanah, kolam/sawah/sungai, pantai/tanah lapang/lainnya sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

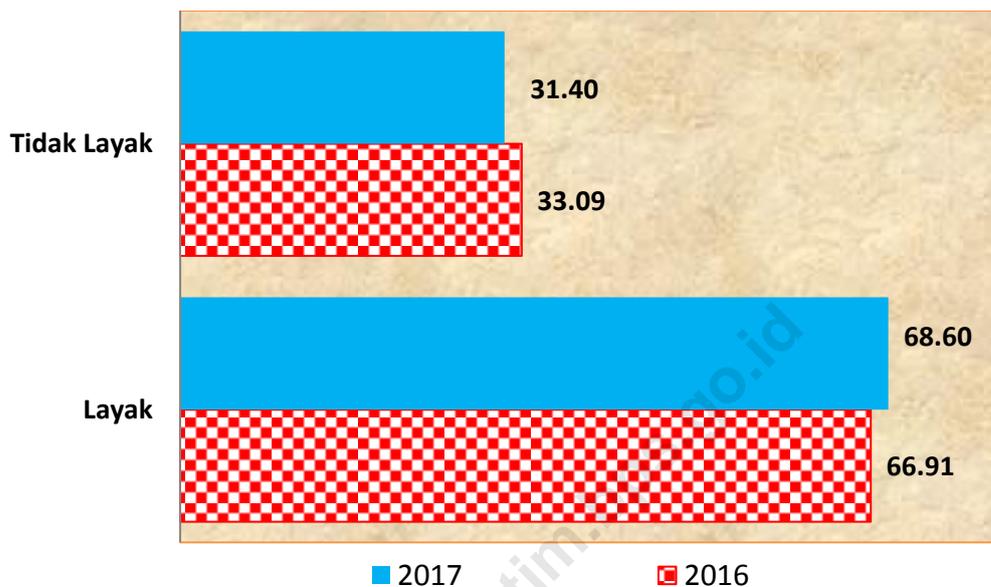
3.3.7. Kualitas Sanitasi yang Digunakan Rumah Tangga

Tantangan yang harus dihadapi terkait dengan masalah air minum, yang higienis dan sanitasi yang layak menjadi prioritas bersama untuk mewujudkannya. Untuk ini maka diperlukan upaya yang terencana serta berkelanjutan.

Hasil Susenas 2017 menunjukkan terjadi peningkatan rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak, dari 66,91 persen tahun 2016 menjadi 68,60 persen tahun 2017. Dengan kata lain, rata-rata setidaknya ada tiga

rumah tangga dari sepuluh rumah tangga di Jawa Timur memiliki sarana sanitasi yang tidak layak.

Gambar 7
Persentase Rumah Tangga menurut Kelayakan Sarana Sanitasi
di Jawa Timur, 2016 – 2017



Permasalahan akses sanitasi layak oleh rumah tangga ini terutama terjadi di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Probolinggo, serta Pacitan, dikarenakan lebih dari separuh rumah tangga di wilayah tersebut belum mengakses sanitasi yang layak. Sebaliknya Kota Surabaya, Kota Blitar dan Gresik merupakan tiga wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan sanitasi yang layak.

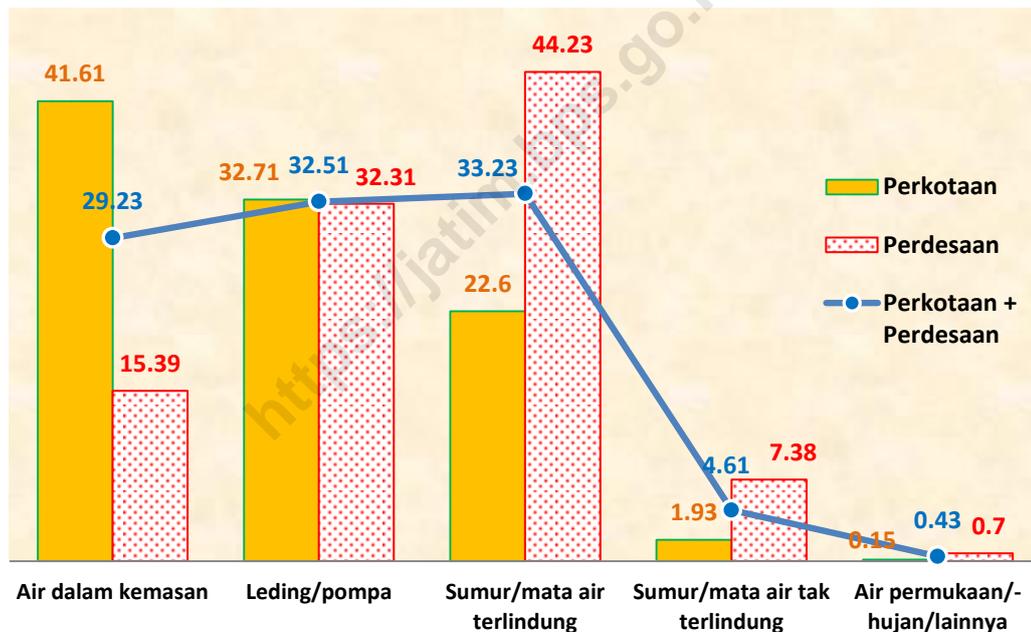
3.3.8. Kualitas Sumber Air Rumah Tangga

Ketersediaan sumber air minum merupakan salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi oleh semua rumah tangga. Untuk itu, tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga kualitas harus terjaga, terutama dari sisi kebersihan dan kesehatan.

3.3.9. Kualitas Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga

Sumber air minum sebagian besar masyarakat di Jawa Timur tahun 2017 berasal dari jenis yang direkomendasikan, dimana 94,96 persen rumah tangga berasal dari sumur/mata air terlindung, leding/pompa, dan air dalam kemasan air dalam kemasan. Namun sebagai catatan bahwa sumber air minum tersebut masih belum dikatakan baik, karena masih perlu dikoreksi dengan aspek kontinuitas dari sisi ketersediaan dan jarak yang aman dari sumber pencemar.

Gambar 8
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang Digunakan dan Wilayah di Jawa Timur, 2017



Jika dilihat keterbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2017 memperlihatkan terdapat pola yang berbeda. Dimana penduduk perkotaan lebih dominan mengkonsumsi air minum yang berasal dari air dalam kemasan. Sedangkan penduduk di perdesaan lebih dominan mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur/mata air terlindung.

Tantangan pemenuhan sumber air minum masih menjadi pekerjaan rumah terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan. Dimana masih ada

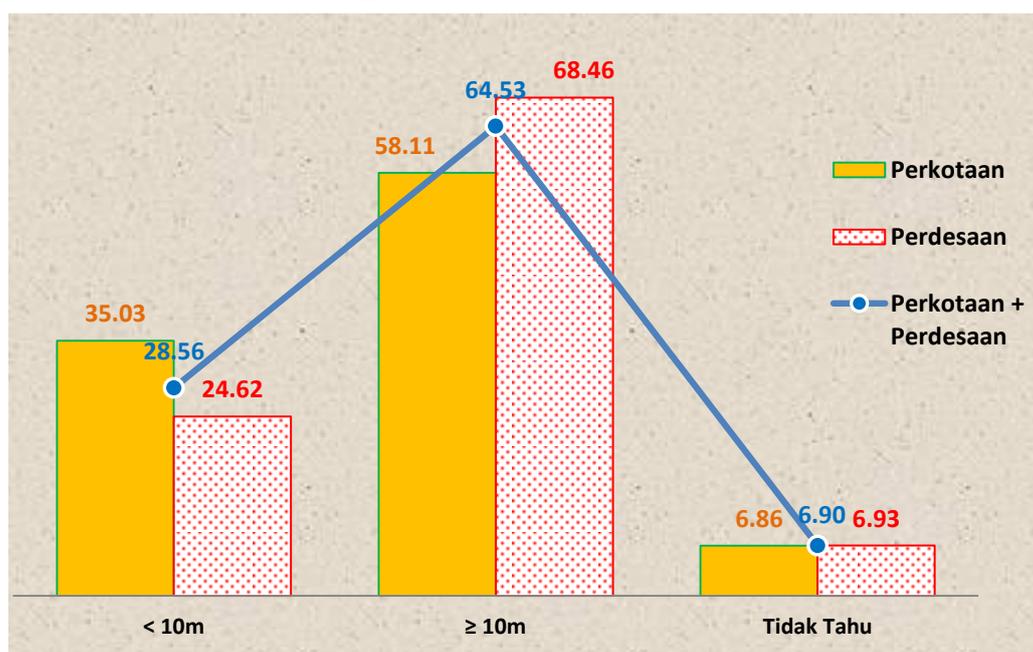
8,08 persen rumah tangga di perdesaan yang sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung serta air permukaan/hujan/lainnya.

Tantangan tersebut terutama berada di wilayah Kabupaten Trenggalek, Sampang, Pacitan, Pamekasan dan Bangkalan. Hal ini dikarenakan rumah tangga di wilayah-wilayah ini lebih dari sepuluh persen bersumber dari sumur/mata air tak terlindung serta air permukaan/hujan/lainnya. Sementara itu tantangan sumber air minum dari sisi ketersediaan yang berkelanjutan di masa mendatang terutama untuk rumah tangga di Surabaya dan Gresik, dimana lebih dari 80 persen rumah tangganya memiliki air minum bersumber dari air dalam kemasan.

3.3.10. Jarak Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat

Khusus rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berasal dari sumur serta mata air, perlu dilihat jarak terdekat ke tempat penampungan limbah terdekat. Jarak yang direkomendasikan aman bagi terjadinya rembesan limbah atau kotoran ke sumber air minum adalah minimal 10 meter.

Gambar 9
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Jawa Timur, 2017



Berdasarkan Susenas 2017, rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur atau mata air baik terlindung maupun tidak terlindung sebagian besar memiliki jarak minimal 10 meter dengan tempat penampungan limbah terdekat, yaitu sebesar 64,53 persen. Sedangkan yang berjarak kurang dari 10 meter sebesar 28,56 persen. Permasalahan jarak minimal dengan tempat penampungan limbah terdekat ini menjadi tantangan terutama bagi pemukiman di wilayah perkotaan. Relatif mahalnya harga lahan di perkotaan, menyebabkan luasan area rumah di wilayah ini menjadi terbatas, sehingga jarak antar rumah menjadi berdekatan atau berhimpitan. Hal ini menyebabkan sulitnya area rumah di pemukiman padat penduduk di perkotaan dapat terpenuhi. Sehingga penyediaan sumber air minum yang berasal dari pipanisasi menjadi solusi, terutama di wilayah perkotaan.

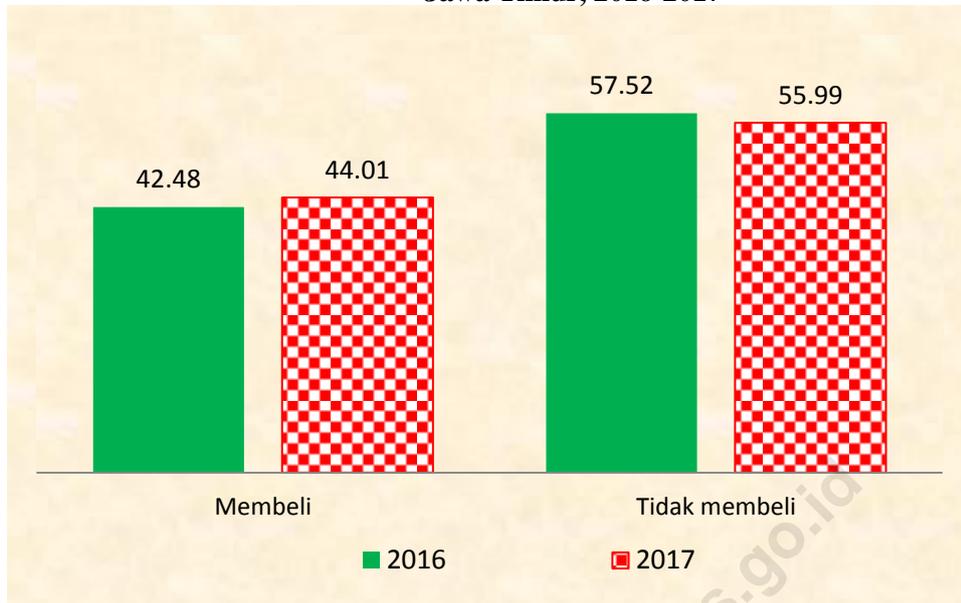
Wilayah Kota Mojokerto dan Kota Madiun merupakan wilayah terbesar untuk rumah tangga dengan sumber air minum dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari sepuluh meter, karena pada wilayah ini sebagian besar rumah tangganya berada pada kondisi tersebut.

3.3.11. Cara Memperoleh Air Minum

Upaya pemenuhan air minum pada rumah tangga di Jawa Timur, sebagian besar tidak membebani rumah tangga dari sisi ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar rumah tangga (55,99 persen) di Jawa Timur tidak perlu membeli untuk mendapatkan sumber air minum yang diperlukan sehari-hari. Meskipun demikian, persentasenya turun lebih dua persen dibandingkan tahun 2016.

Bila dilihat sebaran kabupaten/kota pemenuhan air minum yang tidak membayar terbesar di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember, Trenggalek, Lumajang, dan Kediri, dimana pada wilayah-wilayah tersebut lebih dari 80 persen rumah tangganya tidak perlu membeli air minum. Sedangkan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik merupakan tiga besar wilayah yang rumah tangganya mesti membeli untuk mendapatkan air bersih.

Gambar 10
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum di
Jawa Timur, 2016-2017



3.3.12. Penggunaan Bahan Bakar Utama untuk Memasak

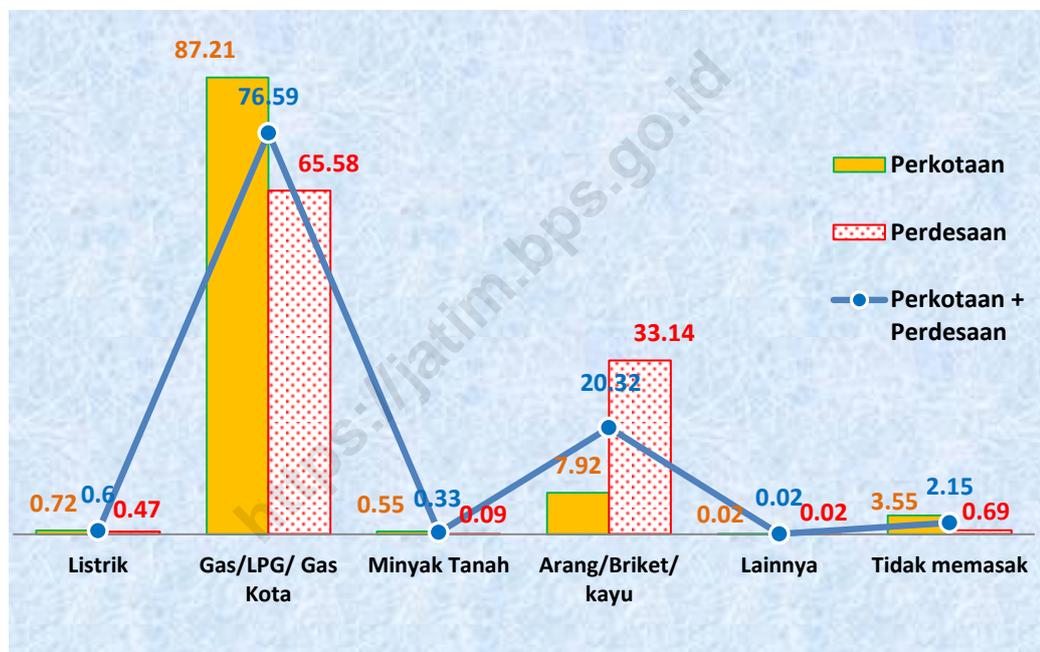
Hal lain yang perlu dilihat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan diharapkan menjadi budaya bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, sebagian besar rumah tangga di Jawa Timur menggunakan bahan bakar jenis gas/LPG/gas kota yaitu sebesar 76,59 persen. Pemanfaatan bahan bakar gas ini sebagian besar di wilayah perkotaan dimana 87,21 persen rumah tangganya menggunakan gas, terpaut dua puluh persen dengan rumah tangga di perdesaan yang memanfaatkan gas (65,58 persen). Namun demikian masih ada sekitar dua puluh persen rumah tangga di Jawa Timur yang memanfaatkan bahan bakar berjenis arang/briket/kayu. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah perdesaan, dimana tiga dari sepuluh rumah tangganya menggunakan bahan bakar arang/briket/kayu untuk memasak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian,

terutama dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak terkendali pemanfaatan, terutama kayu sebagai bahan bakar.

Pemanfaatan arang/briket/kayu sebagai bahan bakar untuk memasak oleh rumah tangga dipilih oleh lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Pacitan dan Bondowoso dan di kedua wilayah ini pula penggunaan bahan bakar yang ideal untuk memasak yaitu bahan bakar jenis gas terendah di Jawa Timur tahun 2017.

Gambar 11
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan Memasak dan Wilayah di Jawa Timur, 2017



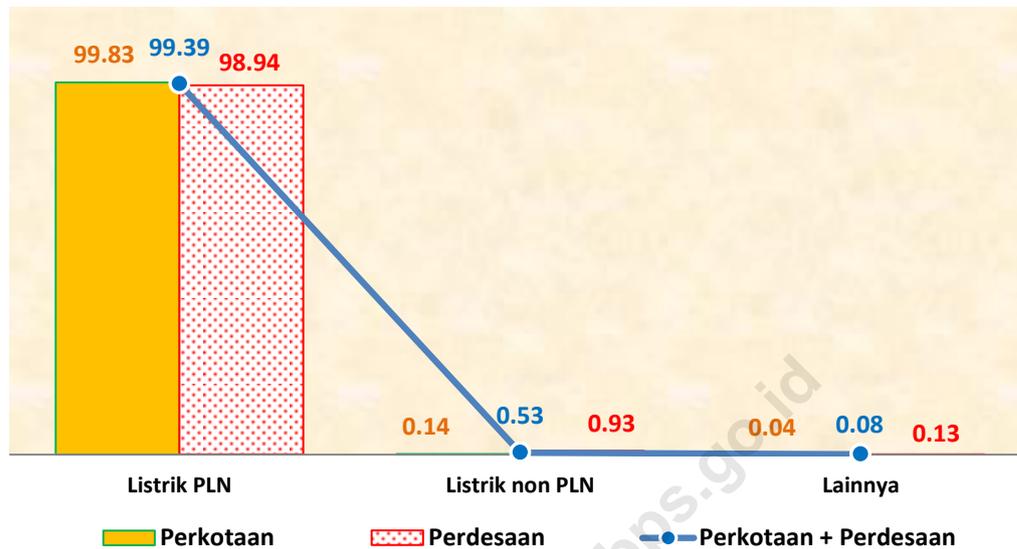
3.3.13. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital, bahkan elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Mengingat akses pada sumber penerangan yang kontinu berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan kualitas hidup penduduk, karena sumber penerangan tidak hanya memiliki fungsi pencahayaan saja, namun memiliki peran ekonomis bagi rumah tangga.

Dari hasil Susenas tahun 2017, hampir seluruh rumah tangga di Jawa Timur sudah menikmati listrik yang bersumber dari listrik PLN. Kondisi ini terutama di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah perdesaan

rumah tangga yang belum memperoleh layanan sumber penerangan berasal dari listrik PLN sekitar 1 persen.

Gambar 12
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Wilayah di Jawa Timur, 2017



Bila dilihat menurut wilayah, rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik terutama di wilayah Kabupaten Tuban, Blitar, dan Sumenep yang merupakan tiga besar persentase rumah tangga belum akses listrik. Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga dengan akses penerangan bersumber listrik PLN terendah (kurang dari 90 persen). Hal ini cukup dimaklumi mengingat sebaran wilayahnya, terutama di kepulauan yang sulit untuk mendapat akses listrik PLN. Namun demikian upaya mandiri dari masyarakat dalam pemenuhan sumber penerangan listrik cukup besar yaitu sebesar 10,59 persen sumber penerangan berasal dari listrik non PLN.



Lampiran Tabel

Tabel 1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Milik sendiri		Kontrak/sewa		Bebas sewa/Dinas		Milik ortu/Famili/Lainnya		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	97,01	96,21	0,97	0,75	2,02	2,71	0,00	0,33	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	94,46	92,77	0,72	1,56	4,67	5,67	0,14	0,00	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	97,60	94,80	0,59	0,40	1,81	4,35	0,00	0,45	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	93,87	91,56	0,79	1,33	5,13	6,88	0,22	0,23	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	94,79	93,75	0,53	1,20	4,42	4,95	0,27	0,11	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	92,93	89,72	2,61	2,69	4,38	7,49	0,08	0,09	100,00	100,00
7 Kab. Malang	95,88	92,20	1,34	3,29	2,48	4,34	0,29	0,17	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	97,50	94,32	1,72	1,20	0,78	4,49	0,00	0,00	100,00	100,00
9 Kab. Jember	91,11	92,10	1,65	3,38	6,94	4,52	0,31	0,00	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	92,14	86,96	1,77	3,06	6,09	9,55	0,00	0,43	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	93,83	91,89	1,35	1,52	4,64	6,59	0,18	0,00	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	93,04	91,23	1,71	1,48	4,90	7,15	0,35	0,14	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	95,87	95,15	0,87	0,67	3,26	3,83	0,00	0,35	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	95,37	93,45	1,70	1,40	2,93	4,75	0,00	0,40	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	83,23	79,17	13,45	16,21	3,33	4,63	0,00	0,00	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	93,88	89,51	1,76	5,81	4,24	4,68	0,12	0,00	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	91,86	88,04	2,26	2,49	5,45	9,24	0,44	0,23	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	93,70	89,48	1,50	1,72	4,51	8,49	0,29	0,31	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	93,87	93,99	0,47	0,93	5,35	4,89	0,30	0,19	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	95,87	90,63	1,03	1,71	2,80	7,65	0,30	0,00	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	96,21	89,46	0,50	0,59	3,29	9,52	0,00	0,43	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	97,89	96,08	0,82	1,42	1,29	2,50	0,00	0,00	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	96,83	96,08	0,47	1,39	2,59	2,53	0,12	0,00	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	93,74	92,94	1,20	1,20	5,06	5,86	0,00	0,00	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	90,15	86,08	5,09	11,10	4,42	2,82	0,34	0,00	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	98,43	96,00	0,85	0,80	0,72	2,71	0,00	0,49	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	94,49	92,37	0,54	1,10	4,97	6,53	0,00	0,00	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	95,75	90,18	0,82	0,77	3,47	9,05	0,00	0,00	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	97,91	93,90	0,72	0,90	1,37	5,20	0,00	0,00	100,00	100,00
71 Kota Kediri	78,08	72,72	10,23	10,71	11,69	15,57	0,00	1,00	100,00	100,00
72 Kota Blitar	77,67	78,04	12,21	8,50	9,90	13,28	0,22	0,18	100,00	100,00
73 Kota Malang	70,05	63,89	21,95	24,07	8,00	12,04	0,00	0,00	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	86,69	87,69	5,56	6,37	7,74	5,94	0,00	0,00	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	86,10	78,15	7,32	9,21	6,24	12,45	0,34	0,19	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	75,67	78,40	13,60	12,95	10,74	8,66	0,00	0,00	100,00	100,00
77 Kota Madiun	65,69	58,49	15,82	16,95	17,20	24,11	1,30	0,44	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	63,69	56,81	23,24	30,06	10,54	12,77	2,53	0,35	100,00	100,00
79 Kota Batu	91,10	88,83	5,78	6,43	2,54	4,74	0,57	0,00	100,00	100,00
Jawa Timur	90,76	87,55	4,32	5,81	4,61	6,47	0,31	0,16	100,00	100,00

Tabel 2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan Tempat Tinggal per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Luas lantai < 8 m2 per kapita		Luas lantai >= 8 m2 per kapita		Rata-rata luas lantai perkapita	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	0,26	1,35	99,74	98,65	31,11	29,36
2 Kab. Ponorogo	0,27	0,89	99,73	99,11	36,46	35,51
3 Kab. Trenggalek	0,00	2,48	100,00	97,52	29,77	29,20
4 Kab. Tulungagung	0,90	1,41	99,10	98,59	31,10	29,92
5 Kab. Blitar	0,00	2,10	100,00	97,90	30,91	32,76
6 Kab. Kediri	0,36	4,10	99,64	95,90	26,07	29,71
7 Kab. Malang	0,13	3,04	99,87	96,96	26,07	29,76
8 Kab. Lumajang	0,00	3,76	100,00	96,24	26,21	24,52
9 Kab. Jember	0,12	3,44	99,88	96,56	24,18	25,12
10 Kab. Banyuwangi	0,24	1,95	99,76	98,05	29,21	30,06
11 Kab. Bondowoso	0,38	1,87	99,62	98,13	25,07	24,47
12 Kab. Situbondo	0,00	4,35	100,00	95,65	23,82	23,64
13 Kab. Probolinggo	0,00	1,97	100,00	98,03	21,36	22,29
14 Kab. Pasuruan	0,10	5,05	99,90	94,95	20,88	24,10
15 Kab. Sidoarjo	0,94	7,74	99,06	92,26	30,75	28,57
16 Kab. Mojokerto	0,00	2,89	100,00	97,11	28,29	29,00
17 Kab. Jombang	0,00	2,80	100,00	97,20	25,86	27,95
18 Kab. Nganjuk	0,00	1,76	100,00	98,24	26,54	28,44
19 Kab. Madiun	0,00	0,39	100,00	99,61	38,47	42,27
20 Kab. Magetan	0,22	0,68	99,78	99,32	48,01	40,52
21 Kab. Ngawi	0,00	1,22	100,00	98,78	39,86	45,34
22 Kab. Bojonegoro	0,00	1,42	100,00	98,58	33,90	38,66
23 Kab. Tuban	0,00	3,55	100,00	96,45	27,89	31,08
24 Kab. Lamongan	2,00	1,07	100,00	98,93	29,60	31,34
25 Kab. Gresik	2,00	7,19	100,00	92,81	26,77	26,60
26 Kab. Bangkalan	0,00	9,30	100,00	90,70	21,74	21,36
27 Kab. Sampang	0,00	1,17	100,00	98,83	28,65	30,58
28 Kab. Pamekasan	0,00	2,47	100,00	97,53	25,03	24,08
29 Kab. Sumenep	0,00	1,13	100,00	98,87	24,63	27,53
71 Kota Kediri	0,39	8,90	99,61	91,10	33,54	29,03
72 Kota Blitar	0,47	6,60	99,53	93,40	29,88	32,92
73 Kota Malang	0,59	6,61	99,41	93,39	28,84	30,40
74 Kota Probolinggo	0,35	5,87	99,65	94,13	25,05	27,03
75 Kota Pasuruan	0,34	12,49	99,66	87,51	27,58	27,26
76 Kota Mojokerto	0,11	5,36	99,89	94,64	33,04	33,60
77 Kota Madiun	0,44	5,38	99,56	94,62	38,75	36,17
78 Kota Surabaya	1,86	24,40	98,14	75,60	27,51	24,73
79 Kota Batu	0,24	4,52	99,76	95,48	26,84	25,52
Jawa Timur	0,30	4,89	99,70	95,11	28,18	29,05

Tabel 3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terlulus Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Beton		Genteng		Asbes		Lainnya		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	1,53	0,97	94,77	96,60	3,70	2,43	0,00	0,00	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	1,19	1,44	98,72	97,88	0,10	0,60	0,00	0,08	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	3,96	6,84	93,47	91,85	2,40	1,31	0,17	0,00	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	1,03	0,75	96,92	96,83	1,94	2,25	0,10	0,18	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	1,25	0,76	97,50	96,97	0,90	2,26	0,35	0,00	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	1,02	0,82	96,38	96,55	2,46	2,38	0,15	0,25	100,00	100,00
7 Kab. Malang	2,23	4,06	93,81	90,20	3,95	5,58	0,00	0,17	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	0,73	1,29	98,10	96,95	1,02	1,67	0,15	0,09	100,00	100,00
9 Kab. Jember	0,48	0,82	98,61	98,84	0,85	0,22	0,07	0,11	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	0,27	0,59	96,40	96,58	3,12	1,60	0,21	1,23	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	0,30	0,00	97,34	97,46	2,36	1,97	0,00	0,57	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	1,27	0,00	92,58	92,46	5,76	4,10	0,40	3,45	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	0,00	0,00	97,32	97,05	2,58	2,89	0,10	0,06	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	1,31	1,94	92,74	91,93	5,67	4,99	0,28	1,14	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	3,97	1,61	89,29	84,44	6,66	11,89	0,08	2,05	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	0,70	0,51	97,66	95,01	1,43	4,48	0,21	0,00	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	0,48	0,23	95,07	93,98	4,45	5,13	0,00	0,67	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	0,83	1,81	96,73	96,86	2,34	1,33	0,10	0,00	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	0,59	3,15	98,95	95,99	0,47	0,74	0,00	0,12	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	0,99	0,90	98,85	98,25	0,16	0,50	0,00	0,35	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	0,14	0,00	99,24	99,49	0,62	0,16	0,00	0,35	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	3,77	0,58	93,71	98,57	1,68	0,85	0,83	0,00	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	3,26	1,76	93,96	96,76	2,59	1,48	0,19	0,00	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	0,00	4,11	96,31	94,17	3,69	1,49	0,00	0,23	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	4,67	2,62	87,86	88,30	7,35	8,92	0,13	0,15	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	1,29	1,10	96,09	96,22	2,52	1,07	0,11	1,61	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	0,39	0,23	99,34	99,75	0,27	0,02	0,00	0,00	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	0,08	0,00	99,49	98,92	0,43	0,77	0,00	0,31	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	2,29	1,80	95,58	97,12	1,54	0,60	0,58	0,48	100,00	100,00
71 Kota Kediri	1,79	1,86	92,18	90,43	6,03	6,78	0,00	0,93	100,00	100,00
72 Kota Blitar	1,70	3,54	93,66	92,15	4,64	4,32	0,00	0,00	100,00	100,00
73 Kota Malang	1,97	1,47	90,27	91,67	7,76	5,64	0,00	1,22	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	0,57	0,00	96,97	99,77	2,46	0,23	0,00	0,00	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	1,01	0,65	93,55	95,97	5,17	3,26	0,27	0,12	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	0,83	1,14	84,45	87,43	14,72	10,62	0,00	0,82	100,00	100,00
77 Kota Madiun	1,83	0,80	94,43	94,13	3,37	4,21	0,37	0,86	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	8,23	4,51	67,28	72,97	24,37	21,53	0,12	0,98	100,00	100,00
79 Kota Batu	7,42	10,21	84,15	82,37	8,25	6,04	0,18	1,37	100,00	100,00
Jawa Timur	1,98	1,73	93,37	93,23	4,51	4,48	0,15	0,55	100,00	100,00

Tabel 4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Tembok/plester-an/anyaman bambu-kawat		Kayu/batang kayu		Bambu/anyaman bambu		Lainnya		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	81,02	84,50	10,90	10,27	6,48	2,96	1,60	2,26	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	93,04	94,21	1,55	1,72	5,03	3,78	0,39	0,29	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	91,80	94,42	2,97	2,56	4,55	2,91	0,68	0,11	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	91,99	94,40	1,51	1,21	6,21	4,38	0,29	0,01	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	91,81	92,55	2,25	3,15	4,90	4,30	1,04	0,00	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	98,16	98,85	0,39	0,20	1,34	0,95	0,11	0,00	100,00	100,00
7 Kab. Malang	92,92	94,02	1,64	1,90	4,74	3,64	0,70	0,44	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	95,98	92,69	0,49	0,64	3,22	5,67	0,31	1,00	100,00	100,00
9 Kab. Jember	85,89	86,10	1,68	2,82	12,10	10,87	0,32	0,21	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	89,80	90,71	0,90	0,89	8,62	7,91	0,68	0,49	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	61,17	65,36	13,70	12,30	23,37	18,87	1,77	3,46	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	52,35	54,82	31,35	29,00	13,54	11,12	2,76	5,06	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	76,37	81,09	8,89	5,77	8,02	5,51	6,72	7,64	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	91,72	94,77	4,37	2,79	2,30	2,31	1,61	0,12	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	99,18	99,23	0,45	0,34	0,37	0,39	0,00	0,03	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	94,12	93,39	1,38	1,79	4,09	4,35	0,42	0,47	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	88,69	90,91	4,02	6,44	6,75	2,65	0,55	0,00	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	91,54	92,20	7,46	6,49	0,78	1,30	0,22	0,00	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	87,81	91,60	9,57	6,08	2,17	1,37	0,45	0,96	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	98,04	99,64	0,65	0,36	0,99	0,00	0,32	0,00	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	53,35	60,78	36,66	35,27	9,68	3,59	0,31	0,36	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	41,27	48,26	51,72	46,00	6,3	5,30	0,69	0,44	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	67,65	68,12	26,85	25,26	5,50	6,62	0,00	0,00	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	77,53	77,58	17,38	16,54	5,09	5,15	0,00	0,74	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	91,01	91,73	7,71	7,99	1,285	0,28	0,00	0,00	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	73,40	72,00	15,05	12,80	8,56	7,27	2,99	7,93	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	57,00	55,36	28,88	32,31	8,46	7,94	5,67	4,39	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	79,82	80,16	2,65	2,55	10,57	10,18	6,96	7,11	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	89,37	88,10	7,99	5,86	2,56	5,95	0,08	0,10	100,00	100,00
71 Kota Kediri	99,67	98,57	0,00	1,43	0,24	0,00	0,09	0,00	100,00	100,00
72 Kota Blitar	98,45	98,50	0,21	0,54	1,34	0,96	0,00	0,00	100,00	100,00
73 Kota Malang	98,10	98,52	0,31	0,60	0,62	0,77	0,97	0,12	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	94,80	98,60	2,67	0,44	2,53	0,96	0,00	0,00	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	99,88	97,84	0,02	1,33	0,10	0,83	0,00	0,00	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	96,63	97,46	0,45	0,00	2,78	2,54	0,14	0,00	100,00	100,00
77 Kota Madiun	99,15	98,13	0,51	1,18	0,34	0,69	0,00	0,00	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	95,80	97,36	3,42	2,25	0,08	0,39	0,70	0,00	100,00	100,00
79 Kota Batu	97,99	96,29	0,58	1,67	0,87	1,43	0,55	0,61	100,00	100,00
Jawa Timur	85,54	87,05	8,17	7,51	5,27	4,43	1,03	1,01	100,00	100,00

Tabel 5 Persentase rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Bukan tanah		Tanah		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	84,51	88,81	15,49	11,19	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	87,39	88,26	12,61	11,74	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	90,66	92,42	9,34	7,58	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	94,21	94,13	5,79	5,87	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	94,04	95,58	5,84	4,42	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	94,98	95,04	4,63	4,96	100,00	100,00
7 Kab. Malang	92,78	93,27	7,22	6,73	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	98,56	97,08	1,22	2,92	100,00	100,00
9 Kab. Jember	93,44	94,00	6,56	6,00	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	93,75	93,27	6,25	6,73	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	80,87	85,22	19,13	14,78	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	78,81	81,90	21,19	18,10	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	77,24	80,56	22,76	19,44	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	94,26	93,04	5,74	6,96	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	98,99	99,83	1,01	0,17	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	93,17	93,89	6,83	6,11	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	90,49	92,83	9,51	7,17	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	84,16	83,65	15,84	16,35	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	83,07	86,51	16,93	13,49	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	95,23	97,37	4,77	2,63	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	53,61	61,70	46,39	38,30	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	53,32	61,06	46,68	38,94	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	70,19	76,81	29,81	23,19	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	81,93	86,34	18,07	13,66	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	95,77	97,91	4,17	2,09	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	88,82	87,42	11,18	12,58	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	67,40	68,34	32,60	31,66	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	80,05	82,60	19,95	17,40	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	95,56	92,17	4,38	7,83	100,00	100,00
71 Kota Kediri	99,59	98,78	0,41	1,22	100,00	100,00
72 Kota Blitar	98,68	99,44	1,32	0,56	100,00	100,00
73 Kota Malang	97,92	99,25	2,08	0,75	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	98,98	100,00	1,02	0,00	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	98,99	99,39	1,01	0,61	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	98,65	99,61	1,35	0,39	100,00	100,00
77 Kota Madiun	98,86	99,39	1,14	0,61	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	99,70	99,80	0,30	0,20	100,00	100,00
79 Kota Batu	96,50	97,57	3,23	2,43	100,00	100,00
Jawa Timur	88,74	90,30	11,23	9,70	100,00	100,00

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota		A d a									
		Digunakan hanya ART sendiri		Digunakan bersama ART rumahtangga lain tertentu		Di MCK Umum		ART tidak menggunakan		Tidak ada fasilitas BAB	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kab. Pacitan	87,75	85,67	11,35	12,21	0,23	0,14	0,00	0,13	0,67	1,86
2	Kab. Ponorogo	78,69	81,99	12,32	10,47	0,60	0,61	0,00	0,00	8,39	6,93
3	Kab. Trenggalek	76,43	73,82	12,12	12,38	0,21	0,64	0,00	0,14	11,25	13,03
4	Kab. Tulungagung	84,18	85,43	10,14	8,31	0,69	0,43	0,08	0,00	4,90	5,83
5	Kab. Blitar	83,07	80,92	10,02	7,94	0,49	0,85	0,09	0,17	6,33	10,11
6	Kab. Kediri	82,48	82,95	9,10	6,80	0,92	0,67	0,23	0,05	7,27	9,54
7	Kab. Malang	86,21	87,36	7,48	6,93	0,28	0,33	0,08	0,00	5,95	5,37
8	Kab. Lumajang	69,31	73,53	8,14	6,39	1,17	0,84	0,48	0,26	20,90	18,98
9	Kab. Jember	58,48	58,80	7,62	10,03	1,44	0,98	0,55	0,30	31,91	29,89
10	Kab. Banyuwangi	74,76	72,78	5,02	7,70	1,09	0,96	0,06	0,11	19,04	18,45
11	Kab. Bondowoso	28,78	31,10	16,36	15,04	3,00	4,66	2,51	0,13	49,35	49,07
12	Kab. Situbondo	34,51	38,35	17,79	14,17	2,47	2,87	0,81	0,59	44,41	44,01
13	Kab. Probolinggo	40,60	50,33	22,66	15,14	1,50	1,99	0,08	0,42	35,16	32,11
14	Kab. Pasuruan	66,89	71,65	10,95	5,09	0,32	2,16	0,48	0,06	21,36	21,04
15	Kab. Sidoarjo	86,04	90,42	8,71	5,08	3,10	2,96	0,00	0,00	2,14	1,54
16	Kab. Mojokerto	79,95	81,07	8,08	5,50	1,67	0,69	0,29	0,20	10,01	12,55
17	Kab. Jombang	76,48	79,04	8,89	8,61	1,38	0,77	0,00	0,00	13,25	11,58
18	Kab. Nganjuk	77,66	79,62	8,78	11,90	2,90	0,80	0,00	0,00	10,65	7,68
19	Kab. Madiun	82,02	84,22	11,41	8,98	0,15	0,75	0,00	0,17	6,42	5,87
20	Kab. Magetan	85,81	90,30	7,90	4,54	0,09	0,18	0,00	0,00	6,20	4,98
21	Kab. Ngawi	71,49	76,26	11,67	16,11	1,45	0,40	1,00	0,00	14,40	7,23
22	Kab. Bojonegoro	77,10	77,53	90,56	9,14	0,87	0,43	0,28	0,14	12,19	12,76
23	Kab. Tuban	70,10	75,16	7,58	5,65	1,88	1,52	0,20	0,00	20,24	17,68
24	Kab. Lamongan	83,57	90,76	6,24	2,34	1,81	0,00	1,08	0,13	7,29	6,77
25	Kab. Gresik	91,80	90,71	5,81	5,65	0,19	2,45	0,00	0,00	2,20	1,19
26	Kab. Bangkalan	80,76	86,95	12,50	7,11	1,70	2,56	0,08	0,29	4,96	3,09
27	Kab. Sampang	66,45	68,41	11,77	14,73	0,21	0,24	0,40	0,00	21,17	16,62
28	Kab. Pamekasan	60,74	66,49	29,16	21,57	1,27	1,27	0,00	0,38	8,82	10,30
29	Kab. Sumenep	54,51	58,06	24,89	24,61	1,03	2,69	0,00	0,28	19,57	14,35
71	Kota Kediri	84,90	84,17	12,86	9,72	1,47	4,36	0,00	0,00	0,77	1,75
72	Kota Blitar	87,11	87,77	10,18	9,72	0,63	0,58	0,00	0,00	2,09	1,93
73	Kota Malang	76,92	80,54	18,90	17,28	3,34	0,35	0,12	0,00	0,73	1,83
74	Kota Probolinggo	75,09	78,87	9,90	9,63	4,46	4,70	0,00	0,20	10,54	6,59
75	Kota Pasuruan	82,82	74,15	3,25	9,14	5,29	8,60	0,92	0,00	7,73	8,12
76	Kota Mojokerto	84,02	87,39	10,28	9,92	3,33	2,52	0,35	0,00	2,02	0,16
77	Kota Madiun	81,32	83,49	17,63	14,66	0,56	1,37	0,00	0,00	0,49	0,49
78	Kota Surabaya	72,32	74,09	23,38	22,23	4,05	3,50	0,00	0,00	0,26	0,18
79	Kota Batu	92,69	95,08	3,97	2,12	0,13	1,23	0,27	0,13	2,94	1,44
	Jawa Timur	73,23	75,71	11,81	10,48	1,50	1,47	0,26	0,11	13,20	12,23

Tabel 7 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

	Kabupaten/Kota	Jenis kloset					
		Leher angsa		Plengsengan		Cemplung/Cubluk	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Kab. Pacitan	65,79	64,36	0,22	1,33	33,87	34,30
2	Kab. Ponorogo	86,51	87,18	1,30	0,73	11,90	12,09
3	Kab. Trenggalek	76,07	83,65	2,48	1,08	21,24	15,27
4	Kab. Tulungagung	84,49	89,66	2,09	2,73	10,40	7,61
5	Kab. Blitar	82,00	84,56	1,32	4,16	14,89	11,28
6	Kab. Kediri	89,11	89,91	1,07	1,85	9,70	8,24
7	Kab. Malang	84,94	88,81	3,95	3,65	7,64	7,54
8	Kab. Lumajang	86,57	88,07	1,38	1,86	11,26	10,07
9	Kab. Jember	91,12	94,07	2,83	0,99	5,86	4,93
10	Kab. Banyuwangi	95,89	94,69	1,15	3,03	2,94	2,27
11	Kab. Bondowoso	86,78	82,29	1,54	1,54	9,50	16,17
12	Kab. Situbondo	89,01	88,26	1,11	2,61	9,21	9,13
13	Kab. Probolinggo	69,00	81,91	0,60	5,25	27,83	12,84
14	Kab. Pasuruan	86,24	94,80	2,53	1,89	10,83	3,31
15	Kab. Sidoarjo	96,74	99,93	0,10	0,07	2,22	0,00
16	Kab. Mojokerto	97,81	96,90	0,39	1,23	1,60	1,87
17	Kab. Jombang	97,30	97,30	0,66	0,82	1,79	1,88
18	Kab. Nganjuk	86,17	88,59	2,57	0,72	10,67	10,70
19	Kab. Madiun	92,32	95,37	0,88	0,83	6,80	3,80
20	Kab. Magetan	95,26	94,38	0,40	0,57	3,65	5,05
21	Kab. Ngawi	72,68	82,99	4,01	2,33	22,96	14,68
22	Kab. Bojonegoro	84,60	90,18	0,96	3,48	14,27	6,34
23	Kab. Tuban	88,38	89,76	2,46	1,50	8,74	8,74
24	Kab. Lamongan	94,94	95,38	0,79	3,10	3,40	1,52
25	Kab. Gresik	98,43	97,96	0,88	0,66	0,49	1,39
26	Kab. Bangkalan	45,01	47,34	2,60	1,84	50,30	50,82
27	Kab. Sampang	77,97	78,34	0,19	0,00	21,72	21,66
28	Kab. Pamekasan	81,74	87,34	0,82	1,82	15,98	10,84
29	Kab. Sumenep	74,24	72,29	0,87	2,44	23,18	25,27
71	Kota Kediri	98,29	99,16	0,13	0,42	1,43	0,42
72	Kota Blitar	99,59	99,56	0,28	0,44	0,00	0,00
73	Kota Malang	97,33	98,68	0,13	1,22	1,40	0,10
74	Kota Probolinggo	97,11	97,85	1,20	0,62	1,41	1,54
75	Kota Pasuruan	96,64	98,45	1,84	0,85	0,47	0,70
76	Kota Mojokerto	99,69	100,00	0,00	0,00	0,31	0,00
77	Kota Madiun	100,00	95,60	0,00	4,40	0,00	0,00
78	Kota Surabaya	99,50	99,74	0,08	0,26	0,30	0,00
79	Kota Batu	99,41	99,31	0,59	0,49	0,00	0,19
	Jawa Timur	88,10	90,37	1,38	1,74	9,64	7,89

Tabel 8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir tinja									
	Tangki/IPAL		Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut		Lubang tanah		Pantai/tanah lapang/kebun		Lainnya	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	53,69	48,25	0,22	0,00	45,39	50,62	0,41	1,04	0,28	0,09
2 Kab. Ponorogo	75,57	81,21	8,08	0,84	15,95	17,80	0,00	0,14	0,40	0,00
3 Kab. Trenggalek	63,63	78,06	10,87	2,53	23,40	17,82	1,37	0,45	0,74	1,13
4 Kab. Tulungagung	82,07	88,62	5,03	1,74	10,47	9,19	1,58	0,45	0,86	0,00
5 Kab. Blitar	73,71	76,12	9,04	6,22	13,54	17,66	0,33	0,00	3,38	0,00
6 Kab. Kediri	79,75	87,75	8,14	2,62	10,62	9,63	0,73	0,00	0,77	0,00
7 Kab. Malang	58,84	64,67	5,05	2,86	34,23	32,47	0,63	0,00	1,25	0,00
8 Kab. Lumajang	54,73	66,62	19,79	5,30	22,46	27,68	2,61	0,15	0,42	0,25
9 Kab. Jember	54,61	87,45	35,26	4,01	9,76	8,39	0,24	0,00	0,14	0,15
10 Kab. Banyuwangi	70,15	90,42	22,26	4,86	5,97	3,96	0,64	0,10	0,99	0,66
11 Kab. Bondowoso	31,89	52,73	49,62	8,54	12,34	37,10	5,64	0,49	0,51	1,14
12 Kab. Situbondo	42,37	69,47	42,59	1,80	11,48	28,12	2,03	0,61	1,53	0,00
13 Kab. Probolinggo	37,73	69,39	33,51	1,91	24,60	27,45	3,08	1,11	1,08	0,15
14 Kab. Pasuruan	59,43	70,95	20,83	7,55	14,80	20,63	2,79	0,53	2,15	0,34
15 Kab. Sidoarjo	94,41	98,43	4,79	1,29	0,70	0,27	0,10	0,00	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	85,89	93,82	11,71	2,74	1,88	3,22	0,42	0,22	0,10	0,00
17 Kab. Jombang	83,10	96,26	10,34	1,54	3,49	2,20	1,96	0,00	1,12	0,00
18 Kab. Nganjuk	75,64	85,09	7,64	0,87	15,12	13,73	0,11	0,32	1,49	0,00
19 Kab. Madiun	86,18	92,82	5,91	1,64	7,49	5,54	0,00	0,00	0,41	0,00
20 Kab. Magetan	83,14	86,93	5,18	0,84	8,87	12,23	0,71	0,00	2,10	0,00
21 Kab. Ngawi	62,57	81,34	15,29	4,20	20,30	14,46	0,41	0,00	1,43	0,00
22 Kab. Bojonegoro	69,46	88,66	10,56	0,92	17,87	10,18	1,03	0,24	1,08	0,00
23 Kab. Tuban	69,19	80,77	11,66	3,13	9,04	14,50	9,06	1,06	1,05	0,53
24 Kab. Lamongan	85,07	90,21	9,71	2,69	3,87	6,00	1,01	0,20	0,35	0,90
25 Kab. Gresik	96,57	97,54	1,30	0,44	1,53	1,76	0,16	0,27	0,44	0,00
26 Kab. Bangkalan	37,12	40,73	3,94	0,55	54,37	56,83	4,02	1,88	0,55	0,00
27 Kab. Sampang	54,74	67,08	6,83	0,24	25,82	32,32	12,36	0,36	0,25	0,00
28 Kab. Pamekasan	32,25	23,06	5,54	1,91	55,91	73,19	5,37	1,67	0,93	0,17
29 Kab. Sumenep	38,02	19,90	2,95	2,69	43,14	75,20	15,45	2,21	0,44	0,00
71 Kota Kediri	95,14	95,58	2,84	2,54	1,53	1,88	0,00	0,00	0,50	0,00
72 Kota Blitar	95,32	96,71	4,51	1,94	0,17	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Kota Malang	81,77	85,27	16,68	12,26	1,00	0,76	0,00	0,00	0,55	1,71
74 Kota Probolinggo	82,39	95,02	13,17	2,86	3,24	1,67	0,00	0,24	1,20	0,21
75 Kota Pasuruan	81,41	92,30	14,60	7,40	3,27	0,27	0,72	0,00	0,00	0,03
76 Kota Mojokerto	94,10	95,93	5,81	4,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Kota Madiun	97,91	96,68	1,11	1,59	0,00	1,23	0,00	0,00	0,97	0,50
78 Kota Surabaya	95,72	98,57	3,08	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
79 Kota Batu	91,72	93,18	5,64	5,70	1,97	1,11	0,00	0,00	0,68	0,00
Jawa Timur	69,52	80,29	13,00	2,89	14,60	16,31	2,07	0,32	0,90	0,19

Tabel 9 Persentase Rumah Tangga Dibedakan menurut Sanitasi Layak/Tidak Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Penggunaan sarana sanitasi					
	Layak		Tidak layak		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	52,71	47,22	47,29	52,78	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	75,26	74,80	24,74	25,20	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	63,25	67,28	36,75	32,72	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	76,76	82,37	23,24	17,63	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	71,52	65,97	28,48	34,03	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	78,92	78,45	21,08	21,55	100,00	100,00
7 Kab. Malang	56,90	60,12	43,10	39,88	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	53,86	52,15	46,14	47,85	100,00	100,00
9 Kab. Jember	52,03	59,97	47,97	40,03	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	69,59	70,36	30,41	29,64	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	29,10	24,19	70,90	75,81	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	37,00	36,49	63,00	63,51	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	35,09	44,04	64,90	55,96	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	58,87	53,99	41,13	46,01	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	91,51	93,94	8,49	6,06	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	84,42	81,04	15,58	18,96	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	81,37	84,07	18,63	15,93	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	68,12	77,87	31,88	22,13	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	82,38	86,51	17,62	13,49	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	82,71	82,17	17,29	17,83	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	59,63	74,13	40,37	25,87	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	68,66	76,20	31,34	23,80	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	66,94	64,45	33,06	35,55	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	83,53	81,48	16,47	18,52	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	96,18	93,97	3,82	6,03	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	35,51	37,26	64,49	62,74	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	54,29	55,77	45,71	44,23	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	31,49	19,71	68,51	80,29	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	36,81	16,34	63,19	83,66	100,00	100,00
71 Kota Kediri	93,82	89,54	6,18	10,46	100,00	100,00
72 Kota Blitar	89,38	94,28	10,62	5,72	100,00	100,00
73 Kota Malang	78,24	83,20	21,76	16,80	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	79,00	83,88	21,00	16,12	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	72,18	76,58	27,82	23,42	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	90,42	93,35	9,58	6,65	100,00	100,00
77 Kota Madiun	97,36	90,81	2,64	9,19	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	86,50	94,69	13,50	5,31	100,00	100,00
79 Kota Batu	83,86	90,37	16,14	9,63	100,00	100,00
Jawa Timur	66,91	68,60	33,09	31,40	100,00	100,00

Tabel 10 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama									
	Air Dalam Kemasan		Leding/Pompa		Sumur/Mata Air Terlindung		Sumur/Mata Air Tak Terlindung		Air Permukaan/Hujan/Lainnya	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	11,50	10,02	18,90	19,81	42,57	46,98	25,02	22,59	2,00	0,61
2 Kab. Ponorogo	13,05	15,69	41,54	42,24	41,98	36,61	3,42	5,45	0,00	0,00
3 Kab. Trenggalek	14,08	12,71	10,61	12,61	47,94	43,82	26,64	30,86	0,73	0,00
4 Kab. Tulungagung	12,84	19,54	34,72	33,34	50,06	45,81	2,26	1,30	0,12	0,00
5 Kab. Blitar	7,11	9,54	24,08	17,20	66,03	65,14	2,70	8,13	0,07	0,00
6 Kab. Kediri	12,49	13,29	56,30	60,27	26,24	22,95	4,87	3,50	0,11	0,00
7 Kab. Malang	4,03	5,87	21,99	30,81	65,12	59,76	8,42	3,55	0,44	0,00
8 Kab. Lumajang	8,79	6,86	18,83	21,83	65,92	68,15	3,14	2,26	3,32	0,91
9 Kab. Jember	9,67	14,50	20,93	22,55	63,93	55,47	5,47	7,48	0,00	0,00
10 Kab. Banyuwangi	14,80	19,38	17,68	30,17	60,82	44,60	6,18	5,64	0,51	0,20
11 Kab. Bondowoso	2,83	3,86	33,42	30,46	57,17	58,10	4,91	5,24	1,67	2,34
12 Kab. Situbondo	4,97	7,05	60,11	63,88	29,25	23,30	5,68	5,77	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	6,12	9,39	51,13	54,65	30,55	31,06	11,52	4,32	0,68	0,57
14 Kab. Pasuruan	12,13	17,38	37,66	43,03	48,44	36,58	1,65	2,88	0,12	0,13
15 Kab. Sidoarjo	56,97	62,89	18,85	9,78	24,11	27,01	0,07	0,31	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	25,25	31,48	51,20	47,99	21,99	18,76	1,55	1,77	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	25,86	35,85	50,65	42,72	22,47	20,37	1,02	1,05	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	18,60	21,40	62,14	54,97	18,45	22,16	0,73	1,47	0,08	0,00
19 Kab. Madiun	13,45	21,50	61,02	55,22	24,59	19,25	0,95	4,03	0,00	0,00
20 Kab. Magetan	10,53	11,95	46,94	44,77	42,36	42,55	0,17	0,73	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	18,24	25,56	35,32	39,85	41,74	32,16	3,84	2,42	0,85	0,00
22 Kab. Bojonegoro	33,60	37,64	44,52	42,08	17,99	18,99	3,89	1,29	0,00	0,00
23 Kab. Tuban	35,26	40,61	44,78	35,24	15,13	21,92	2,08	1,73	2,74	0,50
24 Kab. Lamongan	68,93	62,26	14,79	19,70	11,67	13,43	0,85	1,19	3,76	3,41
25 Kab. Gresik	77,55	84,78	10,72	8,05	8,73	6,91	0,68	0,00	2,32	0,26
26 Kab. Bangkalan	22,22	19,45	17,81	25,99	51,80	40,89	8,04	12,79	0,14	0,88
27 Kab. Sampang	13,02	12,70	22,96	22,28	42,87	36,44	17,56	22,69	3,59	5,88
28 Kab. Pamekasan	9,74	9,46	27,60	30,14	49,46	39,12	12,67	19,03	0,54	2,25
29 Kab. Sumenep	8,12	7,92	25,32	33,49	60,35	53,34	6,20	5,26	0,00	0,00
71 Kota Kediri	34,64	39,67	58,41	57,42	6,95	2,52	0,00	0,13	0,00	0,26
72 Kota Blitar	26,34	29,04	27,30	28,91	42,58	37,58	3,79	4,47	0,00	0,00
73 Kota Malang	40,15	42,54	50,51	46,12	8,71	11,34	0,63	0,00	0,00	0,00
74 Kota Probolinggo	42,71	45,74	55,20	54,02	2,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	40,39	44,25	57,67	54,08	1,94	1,53	0,00	0,14	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	69,83	68,58	29,59	30,83	0,57	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Kota Madiun	66,56	72,31	28,23	24,02	5,21	3,32	0,00	0,34	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	81,94	85,10	17,79	14,90	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Kota Batu	5,88	9,21	23,50	21,80	70,11	67,99	0,51	0,99	0,00	0,00
Jawa Timur	25,81	29,23	32,20	32,51	36,75	33,23	4,61	4,61	0,62	0,42

Tabel 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017

Kabupaten/Kota		Jarak Sumber Air Minum(pompa,sumur,mata air)ke Tempat Penampungan Kotoran							
		< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu		Jumlah/Total	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Kab. Pacitan	13,59	12,07	85,58	86,18	0,83	1,74	100,00	100,00
2	Kab. Ponorogo	9,35	29,09	84,24	68,73	6,41	2,17	100,00	100,00
3	Kab. Trenggalek	23,71	29,87	75,00	68,19	1,28	1,94	100,00	100,00
4	Kab. Tulungagung	37,22	35,56	61,58	61,78	1,20	2,66	100,00	100,00
5	Kab. Blitar	20,78	30,53	76,08	67,56	3,15	1,91	100,00	100,00
6	Kab. Kediri	34,38	35,66	63,98	59,80	1,64	4,54	100,00	100,00
7	Kab. Malang	22,68	23,01	64,99	69,92	12,33	7,07	100,00	100,00
8	Kab. Lumajang	24,82	30,41	66,96	61,74	8,23	7,85	100,00	100,00
9	Kab. Jember	32,40	35,24	64,70	61,92	2,89	2,84	100,00	100,00
10	Kab. Banyuwangi	30,93	26,67	61,98	70,53	7,10	2,80	100,00	100,00
11	Kab. Bondowoso	25,41	23,57	56,97	65,78	17,62	10,65	100,00	100,00
12	Kab. Situbondo	29,01	38,90	60,40	36,99	10,59	24,11	100,00	100,00
13	Kab. Probolinggo	23,13	33,67	68,79	59,43	8,08	6,91	100,00	100,00
14	Kab. Pasuruan	25,30	31,19	59,02	52,76	15,67	16,04	100,00	100,00
15	Kab. Sidoarjo	19,15	13,61	49,03	47,06	31,82	39,33	100,00	100,00
16	Kab. Mojokerto	42,52	40,33	52,71	57,84	4,77	1,83	100,00	100,00
17	Kab. Jombang	20,75	34,72	64,73	58,23	14,52	7,05	100,00	100,00
18	Kab. Nganjuk	28,29	32,74	67,47	65,25	4,24	2,02	100,00	100,00
19	Kab. Madiun	18,33	30,49	80,20	66,32	1,47	3,19	100,00	100,00
20	Kab. Magetan	11,46	21,09	87,89	77,95	0,65	0,96	100,00	100,00
21	Kab. Ngawi	19,41	24,69	72,24	68,67	8,35	6,64	100,00	100,00
22	Kab. Bojonegoro	18,23	26,08	77,30	73,40	4,47	0,52	100,00	100,00
23	Kab. Tuban	24,10	25,92	71,71	67,33	4,19	6,76	100,00	100,00
24	Kab. Lamongan	10,00	32,61	71,91	50,59	18,10	16,79	100,00	100,00
25	Kab. Gresik	27,84	9,88	63,51	81,58	8,65	8,54	100,00	100,00
26	Kab. Bangkalan	21,07	26,35	67,39	62,30	11,54	11,35	100,00	100,00
27	Kab. Sampang	4,87	10,51	94,34	85,49	0,80	3,99	100,00	100,00
28	Kab. Pamekasan	9,57	15,87	90,00	82,27	0,43	1,86	100,00	100,00
29	Kab. Sumenep	15,98	21,45	75,89	70,30	8,13	8,24	100,00	100,00
71	Kota Kediri	57,31	49,63	42,36	49,13	0,33	1,23	100,00	100,00
72	Kota Blitar	52,81	45,81	46,23	52,31	0,96	1,88	100,00	100,00
73	Kota Malang	36,63	30,13	59,14	58,65	4,23	11,21	100,00	100,00
74	Kota Probolinggo	43,03	43,51	56,45	52,61	0,53	3,88	100,00	100,00
75	Kota Pasuruan	47,36	42,71	43,87	49,80	8,76	7,49	100,00	100,00
76	Kota Mojokerto	58,34	58,44	32,42	38,37	9,23	3,19	100,00	100,00
77	Kota Madiun	44,21	56,52	51,87	37,09	3,91	6,40	100,00	100,00
78	Kota Surabaya	40,88	0,00	23,86	100,00	35,23	0,00	100,00	100,00
79	Kota Batu	9,54	6,42	83,56	83,82	6,91	9,76	100,00	100,00
Jawa Timur		24,57	28,56	67,99	64,53	7,44	6,90	100,00	100,00

Tabel 12 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017

Kabupaten/Kota	Cara memperoleh air minum					
	Membeli		Tidak Membeli		Jumlah/Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	29,66	27,51	70,35	72,49	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	21,81	26,16	78,18	73,84	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	17,96	18,20	82,05	81,80	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	25,88	28,33	74,12	71,67	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	23,21	25,62	76,79	74,38	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	17,81	19,53	82,19	80,47	100,00	100,00
7 Kab. Malang	32,95	39,56	67,04	60,44	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	22,71	18,95	77,30	81,05	100,00	100,00
9 Kab. Jember	19,89	17,93	80,11	82,07	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	26,89	34,50	73,11	65,50	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	21,02	12,12	78,97	87,88	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	18,44	17,71	81,56	82,29	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	21,60	23,84	78,41	76,16	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	31,09	32,76	68,91	67,24	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	87,75	91,21	12,24	8,79	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	35,89	39,17	64,11	60,83	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	34,47	40,79	65,53	59,21	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	27,70	30,80	72,30	69,20	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	34,51	36,90	65,49	63,10	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	52,29	49,02	47,71	50,98	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	33,62	40,37	66,39	59,63	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	45,53	46,66	54,47	53,34	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	52,40	61,96	47,60	38,04	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	80,46	75,65	19,53	24,35	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	85,13	87,67	14,87	12,33	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	31,74	25,81	68,26	74,19	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	28,05	31,95	71,95	68,05	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	24,72	21,36	75,28	78,64	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	30,33	26,10	69,66	73,90	100,00	100,00
71 Kota Kediri	43,29	44,75	56,70	55,25	100,00	100,00
72 Kota Blitar	34,72	33,03	65,28	66,97	100,00	100,00
73 Kota Malang	79,94	74,92	20,07	25,08	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	53,10	61,92	46,90	38,08	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	73,79	78,57	26,21	21,43	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	71,68	70,98	28,31	29,02	100,00	100,00
77 Kota Madiun	85,10	87,48	14,90	12,52	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	99,73	96,86	0,27	3,14	100,00	100,00
79 Kota Batu	89,45	80,75	10,54	19,25	100,00	100,00
Jawa Timur	42,48	44,01	57,52	55,99	100,00	100,00

Tabel 13 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak/Tidak Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Air Minum					
	Layak		Tidak Layak		Jumlah/Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	65,90	72,45	34,10	27,55	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	86,31	74,36	13,69	25,64	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	55,39	70,00	44,61	30,00	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	67,67	73,80	32,33	26,20	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	79,15	61,22	20,85	38,78	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	65,48	85,71	34,52	14,29	100,00	100,00
7 Kab. Malang	65,98	63,91	34,02	36,09	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	72,52	64,81	27,48	35,19	100,00	100,00
9 Kab. Jember	66,86	67,76	33,14	32,24	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	65,45	78,24	34,55	21,76	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	62,76	56,63	37,24	43,37	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	62,60	80,19	37,40	19,81	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	64,24	75,61	35,76	24,39	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	66,65	69,67	33,35	30,33	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	92,99	91,01	7,01	8,99	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	66,68	87,46	33,32	12,54	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	73,92	90,58	26,08	9,42	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	73,72	88,97	26,28	11,03	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	85,70	87,70	14,30	12,30	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	93,78	80,69	6,22	19,31	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	77,15	82,24	22,85	17,76	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	81,75	94,02	18,25	5,98	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	82,29	86,36	17,71	13,64	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	78,39	81,22	21,61	18,78	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	84,41	86,14	15,59	13,86	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	72,36	79,04	27,64	20,96	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	80,82	85,17	19,18	14,83	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	80,45	88,09	19,55	11,91	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	76,69	74,33	23,31	25,67	100,00	100,00
71 Kota Kediri	65,94	95,22	34,06	4,78	100,00	100,00
72 Kota Blitar	62,12	80,43	37,88	19,57	100,00	100,00
73 Kota Malang	88,76	94,16	11,24	5,84	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	78,90	99,76	21,10	0,24	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	84,66	98,37	15,34	1,63	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	81,22	98,05	18,78	1,95	100,00	100,00
77 Kota Madiun	92,46	96,80	7,54	3,20	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	97,88	95,43	2,12	4,57	100,00	100,00
79 Kota Batu	87,99	32,42	12,01	67,58	100,00	100,00
Jawa Timur	75,83	79,91	24,17	20,09	100,00	100,00

Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama					Air Sungai/Hujan/Lainnya
	Air Dalam Kemasan	Leding/sumur bor/pompa	Sumur/Mata Air Terlindung	Sumur/Mata Air Tak Terlindung		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Kab. Pacitan	0,00	20,62	56,65	21,79	0,94	
2 Kab. Ponorogo	0,09	54,74	38,77	6,11	0,29	
3 Kab. Trenggalek	0,00	16,69	52,32	30,80	0,20	
4 Kab. Tulungagung	0,15	44,68	54,02	1,16	0,00	
5 Kab. Blitar	0,00	23,24	67,79	8,89	0,08	
6 Kab. Kediri	0,60	69,55	25,99	3,86	0,00	
7 Kab. Malang	0,53	34,04	60,94	4,15	0,35	
8 Kab. Lumajang	0,26	23,42	71,54	2,64	2,13	
9 Kab. Jember	1,07	20,82	64,98	9,49	3,64	
10 Kab. Banyuwangi	0,00	38,61	51,89	6,12	3,38	
11 Kab. Bondowoso	0,10	31,06	53,02	4,23	11,59	
12 Kab. Situbondo	0,00	65,61	24,22	6,05	4,12	
13 Kab. Probolinggo	0,07	61,69	27,59	3,14	7,51	
14 Kab. Pasuruan	0,27	51,79	44,39	2,68	0,87	
15 Kab. Sidoarjo	3,00	56,15	40,32	0,53	0,00	
16 Kab. Mojokerto	1,13	75,48	21,00	1,94	0,46	
17 Kab. Jombang	0,00	72,24	26,28	1,33	0,15	
18 Kab. Nganjuk	0,19	72,03	26,41	1,37	0,00	
19 Kab. Madiun	0,00	73,06	23,19	3,57	0,18	
20 Kab. Magetan	0,62	53,06	45,83	0,50	0,00	
21 Kab. Ngawi	1,50	57,34	38,35	2,81	0,00	
22 Kab. Bojonegoro	0,00	72,53	25,60	1,87	0,00	
23 Kab. Tuban	1,07	63,58	31,13	2,77	1,45	
24 Kab. Lamongan	1,08	51,79	32,41	4,47	10,25	
25 Kab. Gresik	0,00	70,89	21,08	1,22	6,81	
26 Kab. Bangkalan	1,22	34,96	48,55	12,30	2,97	
27 Kab. Sampang	0,22	27,57	36,29	24,19	11,73	
28 Kab. Pamekasan	0,02	34,22	44,62	18,05	3,09	
29 Kab. Sumenep	1,45	38,36	55,05	4,79	0,35	
71 Kota Kediri	2,27	92,48	4,90	0,35	0,00	
72 Kota Blitar	0,47	49,40	45,84	4,10	0,18	
73 Kota Malang	0,00	85,00	14,90	0,10	0,00	
74 Kota Probolinggo	0,00	99,22	0,78	0,00	0,00	
75 Kota Pasuruan	0,51	96,18	2,62	0,18	0,51	
76 Kota Mojokerto	1,49	97,18	1,11	0,22	0,00	
77 Kota Madiun	2,25	91,47	5,66	0,62	0,00	
78 Kota Surabaya	5,00	89,94	5,07	0,00	0,00	
79 Kota Batu	0,00	24,90	73,56	1,54	0,00	
Jawa Timur	0,93	53,21	38,87	4,97	2,02	

Tabel 15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Minum (pompa,sumur,mata air) ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat			
	<10 m	≥10 m	Tidak Tahu	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	12,07	86,18	1,74	100,00
2 Kab. Ponorogo	29,09	68,73	2,17	100,00
3 Kab. Trenggalek	29,87	68,19	1,94	100,00
4 Kab. Tulungagung	35,56	61,78	2,66	100,00
5 Kab. Blitar	30,53	67,56	1,91	100,00
6 Kab. Kediri	35,66	59,80	4,54	100,00
7 Kab. Malang	23,01	69,92	7,07	100,00
8 Kab. Lumajang	30,41	61,74	7,85	100,00
9 Kab. Jember	35,24	61,92	2,84	100,00
10 Kab. Banyuwangi	26,67	70,53	2,80	100,00
11 Kab. Bondowoso	23,57	65,78	10,65	100,00
12 Kab. Situbondo	38,90	36,99	24,11	100,00
13 Kab. Probolinggo	33,67	59,43	6,91	100,00
14 Kab. Pasuruan	31,19	52,76	16,04	100,00
15 Kab. Sidoarjo	13,61	47,06	39,33	100,00
16 Kab. Mojokerto	40,33	57,84	1,83	100,00
17 Kab. Jombang	34,72	58,23	7,05	100,00
18 Kab. Nganjuk	32,74	65,25	2,02	100,00
19 Kab. Madiun	30,49	66,32	3,19	100,00
20 Kab. Magetan	21,09	77,95	0,96	100,00
21 Kab. Ngawi	24,69	68,67	6,64	100,00
22 Kab. Bojonegoro	26,08	73,40	0,52	100,00
23 Kab. Tuban	25,92	67,33	6,76	100,00
24 Kab. Lamongan	32,61	50,59	16,79	100,00
25 Kab. Gresik	9,88	81,58	8,54	100,00
26 Kab. Bangkalan	26,35	62,30	11,35	100,00
27 Kab. Sampang	10,51	85,49	3,99	100,00
28 Kab. Pamekasan	15,87	82,27	1,86	100,00
29 Kab. Sumenep	21,45	70,30	8,24	100,00
71 Kota Kediri	49,63	49,13	1,23	100,00
72 Kota Blitar	45,81	52,31	1,88	100,00
73 Kota Malang	30,13	58,65	11,21	100,00
74 Kota Probolinggo	43,51	52,61	3,88	100,00
75 Kota Pasuruan	42,71	49,80	7,49	100,00
76 Kota Mojokerto	58,44	38,37	3,19	100,00
77 Kota Madiun	56,52	37,09	6,40	100,00
78 Kota Surabaya	0,00	100,00	0,00	100,00
79 Kota Batu	6,42	83,82	9,76	100,00
Jawa Timur	28,56	64,53	6,90	100,00

Tabel 16 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama											
	Listrik		Gas/Elpiji/Gas Kota		Minyak Tanah		Arang/Briket/Kayu		Lainnya		Tidak memasak	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kab. Pacitan	0,61	0,28	30,90	31,28	0,00	0,00	67,98	68,13	0,19	0,00	0,31	0,32
2 Kab. Ponorogo	0,09	2,25	48,49	55,85	0,00	0,00	49,92	40,63	0,00	0,00	1,50	1,27
3 Kab. Trenggalek	0,86	0,40	60,57	52,74	0,00	0,08	38,31	46,55	0,00	0,00	0,26	0,24
4 Kab. Tulungagung	1,60	1,95	75,01	75,08	0,19	0,00	23,08	21,52	0,11	0,00	0,00	1,45
5 Kab. Blitar	0,47	0,37	59,76	64,85	0,00	0,00	39,56	34,30	0,21	0,00	0,00	0,48
6 Kab. Kediri	1,55	1,03	75,72	79,60	0,29	0,30	21,52	17,61	0,78	0,00	0,14	1,46
7 Kab. Malang	1,08	0,29	70,94	74,07	0,09	0,15	27,66	24,41	0,23	0,00	0,00	1,09
8 Kab. Lumajang	0,67	0,00	60,42	64,08	0,07	0,09	38,05	34,63	0,23	0,00	0,56	1,20
9 Kab. Jember	0,53	0,12	68,17	72,56	0,00	0,00	30,52	25,48	0,00	0,00	0,77	1,84
10 Kab. Banyuwangi	0,59	0,55	75,70	77,83	0,15	0,12	23,27	19,72	0,29	0,00	0,00	1,79
11 Kab. Bondowoso	0,48	0,41	52,34	46,24	0,00	0,00	46,60	52,42	0,46	0,00	0,12	0,94
12 Kab. Situbondo	0,42	0,00	65,32	69,79	0,00	0,00	32,26	28,05	0,00	0,00	2,01	2,17
13 Kab. Probolinggo	0,12	0,69	53,28	64,40	0,00	0,00	46,52	34,48	0,00	0,11	0,08	0,32
14 Kab. Pasuruan	0,90	0,72	79,85	84,76	0,10	0,22	18,63	13,37	0,46	0,00	0,06	0,93
15 Kab. Sidoarjo	0,88	1,52	97,22	94,74	0,13	0,48	0,28	0,39	0,00	0,08	1,50	2,79
16 Kab. Mojokerto	0,31	0,17	94,72	92,70	0,17	0,20	4,39	4,95	0,00	0,00	0,41	1,97
17 Kab. Jombang	0,00	0,00	90,03	88,41	0,00	0,55	9,47	9,67	0,41	0,04	0,10	1,32
18 Kab. Nganjuk	0,52	0,23	75,83	82,74	0,00	0,19	23,35	16,26	0,30	0,00	0,00	0,59
19 Kab. Madiun	0,76	0,00	60,51	76,59	0,11	0,00	37,68	20,94	0,73	0,00	0,20	2,47
20 Kab. Magetan	1,16	0,34	71,39	82,65	0,12	0,30	29,92	15,78	0,09	0,00	0,32	0,94
21 Kab. Ngawi	0,77	0,24	58,84	65,12	0,00	0,00	39,71	32,78	0,62	0,00	0,07	1,85
22 Kab. Bojonegoro	0,65	0,00	63,32	70,97	0,16	0,16	34,98	27,00	0,21	0,00	0,68	1,87
23 Kab. Tuban	0,24	0,31	71,67	79,74	0,35	0,51	26,48	17,57	0,09	0,00	1,17	1,87
24 Kab. Lamongan	0,02	1,85	85,66	91,53	0,25	0,00	13,74	6,21	0,16	0,00	0,16	0,40
25 Kab. Gresik	1,09	0,09	95,85	95,24	0,13	0,38	1,50	1,00	0,26	0,14	1,17	3,16
26 Kab. Bangkalan	0,49	0,20	77,73	75,42	0,16	0,22	21,31	23,88	0,31	0,19	0,00	0,10
27 Kab. Sampang	0,29	0,18	55,77	56,81	0,00	0,04	43,94	42,88	0,00	0,00	0,00	0,09
28 Kab. Pamekasan	0,56	0,00	68,63	68,93	0,52	0,04	30,03	30,67	0,26	0,00	0,00	0,37
29 Kab. Sumenep	0,15	0,21	56,45	62,77	0,65	0,57	42,75	36,09	0,00	0,00	0,00	0,37
71 Kota Kediri	2,37	1,29	91,28	90,32	0,78	1,29	4,32	3,85	0,00	0,00	1,25	3,25
72 Kota Blitar	1,02	0,86	90,20	90,80	0,44	0,41	4,59	4,83	0,00	0,00	3,75	3,09
73 Kota Malang	2,46	0,00	89,91	90,26	0,67	0,84	0,99	1,11	0,11	0,00	5,89	7,79
74 Kota Probolinggo	0,61	0,27	91,05	89,95	0,21	0,41	6,78	7,42	0,00	0,00	1,35	1,94
75 Kota Pasuruan	0,22	0,21	96,69	97,06	0,37	0,62	1,02	0,37	0,00	0,00	1,71	1,75
76 Kota Mojokerto	1,15	0,00	94,13	95,90	0,43	0,65	1,35	0,55	0,33	0,00	2,60	2,89
77 Kota Madiun	1,58	2,69	90,02	89,90	2,06	1,58	3,61	1,28	0,25	0,00	2,48	4,56
78 Kota Surabaya	0,99	1,57	91,22	86,93	2,51	1,75	0,38	0,00	1,01	0,00	3,87	9,75
79 Kota Batu	1,48	0,00	96,78	98,76	0,00	0,00	1,74	1,13	0,00	0,00	0,00	0,11
Jawa Timur	0,73	0,60	73,77	76,59	0,32	0,33	24,08	20,32	0,27	0,02	0,83	2,15

Tabel 17 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016 - 2017

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan							
	Listrik PLN		Listrik Non PLN		Lainnya		Jumlah/Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	99,70	99,86	0,20	0,00	0,09	0,15	100,00	100,00
2 Kab. Ponorogo	99,71	99,76	0,00	0,00	0,29	0,24	100,00	100,00
3 Kab. Trenggalek	99,54	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Kab. Tulungagung	99,66	99,90	0,23	0,00	0,12	0,10	100,00	100,00
5 Kab. Blitar	99,55	99,66	0,45	0,00	0,00	0,33	100,00	100,00
6 Kab. Kediri	99,43	99,85	0,47	0,00	0,10	0,15	100,00	100,00
7 Kab. Malang	99,34	99,77	0,66	0,07	0,00	0,16	100,00	100,00
8 Kab. Lumajang	98,59	98,58	1,41	1,26	0,00	0,16	100,00	100,00
9 Kab. Jember	99,58	99,65	0,42	0,27	0,00	0,07	100,00	100,00
10 Kab. Banyuwangi	98,32	98,67	1,38	1,33	0,30	0,00	100,00	100,00
11 Kab. Bondowoso	94,15	99,64	5,55	0,36	0,30	0,00	100,00	100,00
12 Kab. Situbondo	98,42	99,91	1,31	0,09	0,27	0,00	100,00	100,00
13 Kab. Probolinggo	98,98	98,98	1,02	0,84	0,00	0,18	100,00	100,00
14 Kab. Pasuruan	97,91	99,71	1,89	0,23	0,20	0,06	100,00	100,00
15 Kab. Sidoarjo	100,00	99,94	0,00	0,06	0,00	0,00	100,00	100,00
16 Kab. Mojokerto	99,44	100,00	0,56	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17 Kab. Jombang	99,51	100,00	0,49	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18 Kab. Nganjuk	99,60	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19 Kab. Madiun	98,56	99,85	1,20	0,00	0,24	0,15	100,00	100,00
20 Kab. Magetan	99,57	100,00	0,43	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21 Kab. Ngawi	97,72	99,91	1,46	0,00	0,82	0,10	100,00	100,00
22 Kab. Bojonegoro	99,44	98,72	0,48	1,29	0,08	0,00	100,00	100,00
23 Kab. Tuban	97,65	99,13	2,15	0,39	0,20	0,49	100,00	100,00
24 Kab. Lamongan	100,00	99,94	0,00	0,07	0,00	0,00	100,00	100,00
25 Kab. Gresik	99,71	100,00	0,29	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26 Kab. Bangkalan	99,06	99,77	0,66	0,17	0,29	0,06	100,00	100,00
27 Kab. Sampang	98,98	99,91	0,81	0,00	0,21	0,09	100,00	100,00
28 Kab. Pamekasan	99,75	99,91	0,25	0,09	0,00	0,00	100,00	100,00
29 Kab. Sumenep	80,61	89,45	17,54	10,29	1,84	0,26	100,00	100,00
71 Kota Kediri	99,80	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72 Kota Blitar	99,79	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
73 Kota Malang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	100,00
74 Kota Probolinggo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	99,26	99,53	0,74	0,47	0,00	0,00	100,00	100,00
76 Kota Mojokerto	99,63	99,68	0,18	0,31	0,20	0,00	100,00	100,00
77 Kota Madiun	99,88	99,77	0,12	0,23	0,00	0,00	100,00	100,00
78 Kota Surabaya	99,07	100,00	0,93	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
79 Kota Batu	99,61	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Jawa Timur	98,55	99,39	1,30	0,53	0,15	0,08	100,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri 43-44, Surabaya

Telp. 031- 8439343 Fax. 031-8494007

Email : bps3500@bps.go.id

Website : <http://jatim.bps.go.id>

